PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

MENUJU BANTUL SMART CITY
UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT BANTUL
SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA

LAPORAN KINERJA
LKJ 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 367509 Ext. : 434
E-Mail : diskominfo@bantulkab.go.id.
Website http : // diskominfo.bantulkab.go.id

KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA

STATISTIK

PERSANDIAN

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 tahun 2018

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Januari 2021

Plt.Kepala

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196704031994032008

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Komuniasi dan Informatika telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 tahun 2018

Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 110 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Tugas pokok Dinas Komuniasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung

terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah Dinas Komuniasi dan Informatika memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

1. Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Bidang Statistik
3. Bidang Persandian

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian dari 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 111.05 %. Ada 2(dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)
2. Index kualitas layanan informasi publik

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak ada indikator yang masuk masuk dalam kriteria **Tinggi** (75,1% s/d 90%) dan juga indikator yang masuk dalam kriteria **Sedang** (65.1% s/d 75%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komuniasi dan Informatika yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar ii
Ikhtisar Eksekutif iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Pembentukan OPD 1
C. Susunan Organisasi 2
D. Keragaman SDM 17
E. Isu Strategis 22
BAB II PERENCANAAN KINERJA 24
A. Rencana Strategis 24
1. Visi dan Misi 24
2. Tujuan dan Sasaran 26
3. Kebijakan, Strategi dan Program 29
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 33
C. Program untuk Pencapaian Sasaran 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 38
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 39
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 39
1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar 40
2. Sasaran Index kualitas layanan informasi publik 51
C. Akuntabilitas Anggaran 111
D. Efisiensi Sumber Daya 126
BAB IV PENUTUP 129

Daftar Tabel

Tabel I.1 Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 17

Tabel I.2 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan..... 19

Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan 21

Tabel I.4 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf..... 21

Tabel I.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 22

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran..... 27

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Komuniasi dan Informatika..... 29

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 32

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 33

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021 37

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 39

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 39

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar 42

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar 52

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021..... 111

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021..... 113

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 128

Daftar Gambar

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 3
Gambar I.2 Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan..... 20
Gambar I.3 Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan..... 21
Gambar I.4 Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan..... 21
Gambar I.5 Grafik Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis Kelamin 22
Gambar III.1 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran IKU Pertama Dinas Komunikasi Dan Informatika 42
Gambar III.2 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran IKU Kedua Dinas Komunikasi dan Informatika 52
Gambar III.3 Dokumen Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik di Kabupaten Bantul 54
Gambar III.4 Tampilan landing page website bantulkab.go.id..... 56
Gambar III.5 Pelaksanaan kegiatan peliputan 51
Gambar III.6 Tampilan berita dalam website bantulkab.go.id 57
Gambar III.7 Facebook Pemkab Bantul Instagram Pemkab Bantu 58
Gambar III.8 Twitter Pemkab Bantul Channel Youtube Bantul TV 58
Gambar III. 9 Publikasi Kegiatan di Media Masa Online 66
Gambar III. 10 dampak dari program iklan yang dijalankan di media sosial Pemkab Bantul 67
Gambar III. 11 Workshop Pengelola Grup Netizen Lokal Bantul 68
Gambar III. 12 Penyerahan Penghargaan kepada Grup Netizen Lokal Bantul Terfavorit 69
Gambar III. 13 Lomba video Bantul Bangkit..... 70
Gambar III. 14 Pemenang Lomba video Bantul Bangkit 58
Gambar III. 15 Siaran Langsung Taman Paseban di TVRI Jogja 71

Gambar III. 16 Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat 73
Gambar III. 17 Buletin Sejada 74
Gambar III. 19 Siaran Saba Desa TVRI Jogja 75
Gambar III. 20 Siaran Leyeh-leyeh RBTV 76
Gambar III. 21 Dialog Interaktif di Radio 78
Gambar III. 22 Dialog Interaktif Generasi Muda 79
Gambar III. 23 Cetak majalah Promosi Bantul 80
Gambar III. 24 Liputan Dinamika Pembangunan 81
Gambar III. 25 Konten / Video berita channel Bantul TV 82
Gambar III. 26 Video Profil Bantul 83
Gambar III. 27 Cetak Leaflet 85
Gambar III. 28 Piagam kejuaraan badan publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY 94
Gambar III. 29 Grafik Dataset menurut Perangkat Daerah di Portal Data 98

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* di Kabupaten Bantul.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi,

dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi perangkat daerah baru, menyelenggarakan aspek komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu :

1) Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika;
2) sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian informasi penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
3) sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi persandian; dan
4) sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya telekomunikasi.

C. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Pasal 4, Pemerintahan Daerah mempunyai urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib yaitu komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Adapun susunan organisasi Dinas komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

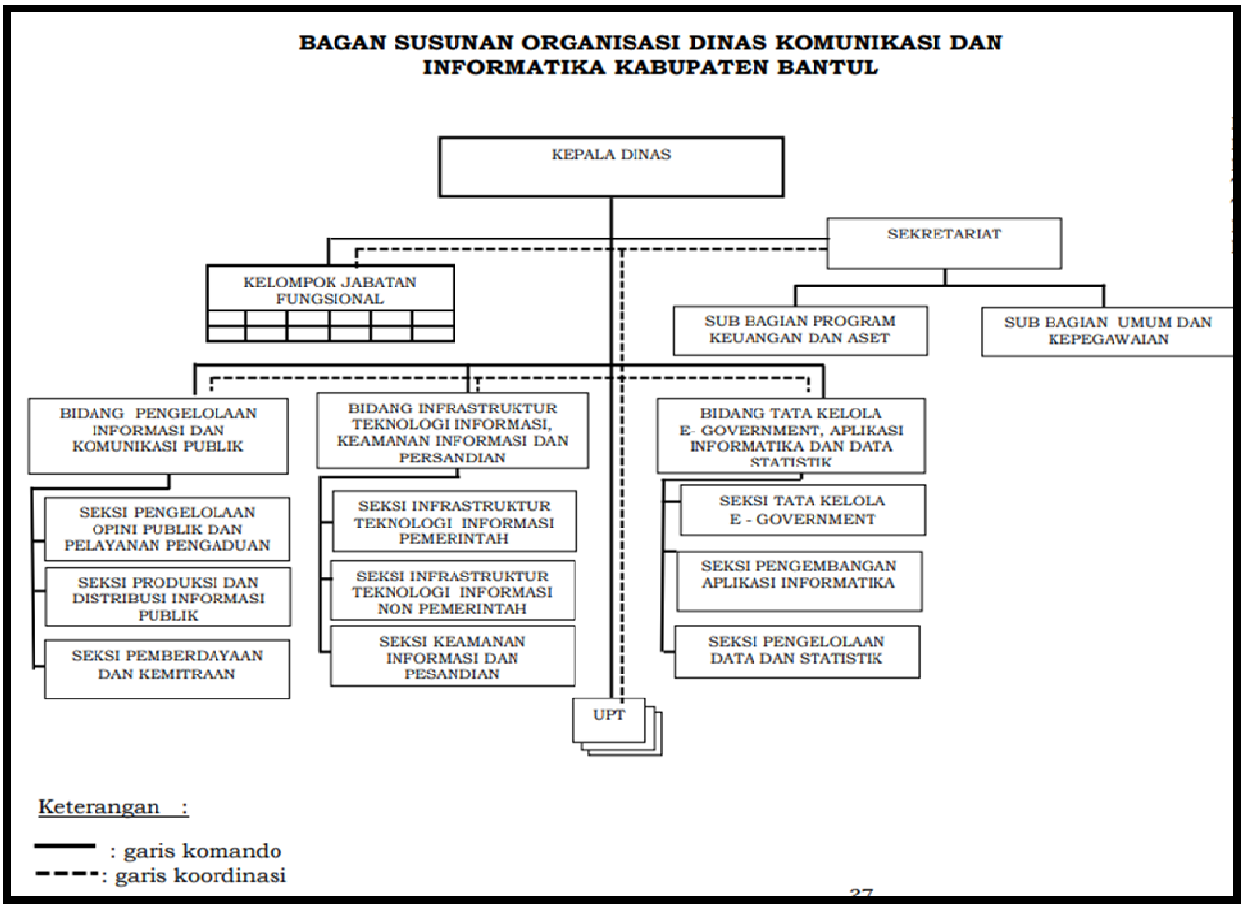

Gambar II.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

   a. penyusunan program kerja Dinas;
   b. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
   c. perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;
   d. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
   e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO ;
   f. pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

g. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
h. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
i. pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;
j. penyelenggaraan statistik sektoral, statistik geospasial dan standarisasi data;
k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program Dinas;
d. pengelolaan keuangan Dinas;
e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
f. pengelolaan barang milik daerah;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
h. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
i. pelaksanaan program kesekretariatan;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset, dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

(3) Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
e. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
f. pengelolaan keuangan Dinas;
g. pengelolaan barang milik daerah;
h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
c. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
d. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
e. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
f. penyiapan dan pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
g. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan;
h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan publik, penyelenggaraan produksi dan distiribusi informasi publik serta pemberdayaan dan kemitraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, dan pengelolaan saluran informasi publik;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
d. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
e. pengelolaan opini publik;
f. pelayanan pengaduan publik;
g. pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;
h. pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas;
i. pelaksanaan pemberdayaan komunitas informasi;

j. pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas :

a. Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan;
b. Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik; dan
c. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan.

(1) Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

(2) Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi dan opini publik serta pelayanan pengaduan publik.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan publik;
c. pelaksanaan monitoring dan analisis opini publik di media massa dan media sosial;
d. penyelenggaraan layanan dan pengelolaan aduan masyarakat;
e. pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan;
g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

(2) Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan produksi dan distribusi informasi publik.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis produksi dan distribusi informasi publik;
c. pelaksanaan pembuatan materi informasi publik
d. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah maupun non pemerintah daerah;
e. pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai saluran informasi atau media komunikasi massa;
f. pelaksanaan diseminasi kebijakan informasi publik melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
g. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi produksi dan distribusi informasi publik;
h. pengelolaan konten *website*;
i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya;

(1) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

(2) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas pemberdayaan dan pengelolaan kemitraaan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) Seksi Pengelolaan Pemberdayaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan kemitraan;
c. pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga komunikasi publik;
d. pengelolaan konten *website* Pemerintah Daerah;
e. pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) utama dan melakukan pembinaan PPID pembantu;
f. pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai deng tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian

(1) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2) Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi non pemerintah, dan keamanan informasi dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
b. perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
e. pengembangan dan pengelolaan TIK;
f. pengembangan dan pengelolaaan saluran informasi digital;
g. pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* dan *Network Operating Center ;*
h. pengembangan dan penyelenggaraan *Disaster Recovery Center*;
i. pengembangan dan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
j. pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dan persandian;
k. pengembangan dan pengelolaan *Security Operation Center*;
l. pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian terdiri atas :

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah;
b. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah; dan
c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

(1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian.
(2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah dipimpin oleh Kepala Seksi.
(3) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi pemerintah.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi :
    a. penyusunan rencana kerja Seksi;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis infrastruktur dan teknologi sektor pemerintah;

c. pelaksanaan *Data Center* dan *Network Operating Center*;
d. pengembangan dan penyelenggaraan sistem komputer, *server* dan *services*;
e. pelaksanaan *Disaster Recovery Center*;
f. pelaksanaan pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana publikasi milik pemerintah;
g. penyediaan dan pengelolaan *bandwith* untuk akses internet pemerintah dan pelayanan publik;
h. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intranet pemerintah;
i. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan perangkat jaringan pemerintah;
j. pelaksanaan TI publik milik pemerintah;
k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur TI pemerintah;
l. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur TI pemerintah;
m. pengelolaan nama *domain* dan *sub domain* Pemerintah Daerah;
n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah;
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian.
(2) Seksi Seksi Infrastruktur Jaringan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.
(3) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan infrastruktur jaringan umum.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Infrastruktur Informasi Non Pemerintah;
c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dan pengelolaan akses internet publik;

d. pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
e. pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi *Cell Plan* pendirian Menara Telekomunikasi;
f. penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan publik;
g. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur TI non pemerintah;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian.
(2) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi.
(3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian serta pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Keamanan Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian;
c. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan tanda tangan digital Pemerintah Kabupaten Bantul;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik;
e. pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi;
f. pelaksanaan keamanan informasi pada system elektronik pemerintah daerah;
g. pelaksanaan audit teknologi informasi komputer;
h. penyelenggaraan internet sehat;
i. penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola hubungan

komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bantul;

j. penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;

k. penyelenggaraan operator perangkat telekomunikasi;

l. pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

m. pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting;

n. pelaksanaan *Security Operation Center*;

o. pengelolaan *Bantul Command Center*;

p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi keamanan informasi dan persandian;

q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamnan Informasi dan Persandian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik

(1) Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2) Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik mempunyai tugas melaksanakan tata kelola *e-government*, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan data statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik;

b. perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola *E-Government*, aplikasi informatika dan data statistik;

c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan tata kelola *E-Government*, statistik sektoral, dan aplikasi telematika;

d. perumusan kebijakan terpadu implementasi pemerintahan berbasis TIK dan *Smart City;*
e. penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK;
f. pengoordinasian penyelenggaraan *smart city;*
g. pengoordinasian sistem pemerintahan berbasis elektronik;
h. pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
i. pelaksanaan fungsi walidata;
j. pengoordinasian penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non-pemerintah;
k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola *e-government*, aplikasi informatika dan data statistik;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik, terdiri atas :

a. Seksi Tata Kelola *e-Government;*
b. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika; dan
c. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik.

(1) Seksi Tata Kelola *e-Government* dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik.
(2) Seksi Tata Kelola *e-Government* dipimpin oleh Kepala Seksi.
(3) Seksi Tata Kelola *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan tata kelola *e-Government.*
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) Seksi Tata Kelola *e-Government* menyelenggarakan fungsi :
    a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata Kelola *e- Government;*
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tata kelola *e-Government;*
    c. penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e- Government;*
    d. pelaksanaan penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat

daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non-pemerintah;

e. pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

f. pengembangan *Business Process Re-Engineering* pelayanan pada lingkungan pemerintah dan non-pemerintah;

g. penyelenggaraan sistem informasi *Smart City*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;

h. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi dan *Smart City;*

i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata *E-Government*; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik.

(2) Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi informatika.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Aplikasi Informatika;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan aplikasi informatika;

d. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;

e. pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika;

f. pengembangan dan pengelolaan aplikasi website dalam domain dan sub domain;

g. pengelolaan domain pemerintah;

h. pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik;

i. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, layanan *recovery* data dan informasi;

j. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
k. pelaksanaan layanan interoperabilitas;
l. pelaksanaan layanan pusat *Application Program Interface* (API) daerah;
m. penyelenggaraan internet kreatif, inovatif dan produktif;
n. peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;
o. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan aplikasi informatika;
p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang Kepala Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pengelolaan Data Statistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Data Statistik.

(2) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan *desiminasi* data *geospasial* dan statistik sektoral.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengelolaan Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Statistik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan data dan statistik sektoral;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan data dan statistik sektoral;
d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan *diseminasi* data *geospasial* dan statistik sektoral;
e. peningkatan kapasitas kelembagaan data *geospasial* dan statistik sektoral;
f. pengoordinasian data geospasial dan statistik sektoral;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi urusan statistik;
h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola *e-*

Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Komunikasi dan informatika dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berintegritas, dimana tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan ketugasan. Pada tahun 2021 sumber daya manusia yang ada di Dinas Dinas Komunikasi dan informatika sebagai berikut :

Tabel II.1

Daftar ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

NO	NAMA	PANGKAT/GOL/TMT	JABATAN
1	Ir.Fenty Yusdayati,MT	Pembina Utama Muda, IV/c	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Dra. Annihayah, M.Eng	Pembina Tk.I , IV/b	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Kawuniningrum,ST.M.Cs	Pembina, IV/A	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
4	Arif Darmawan,S.STP	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
5	Sri Mulyani, S.STP,M.Eng	Pembina IV/a	Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik
6	Mulyatmi,SE	Penata Tk I, III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7	Agung Nugroho, S.Sos	Penata,III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
8	Sri Mulyani, SE	Penata Tk I,III/d	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan
9	Murtini,S.AP	Penata Tk I, III/d	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah
10	Yahya Pandega Putra,S.IP.,M.I.P	Penata Tk.I ,III/d	Kepala seksi Pengembangan Aplikasi Informatika
11	Winartono,S,Sos	Penata Tk I,III/d	Kepala seksi Keamanan Informasi dan Persandian Keamanan Informasi dan Persandian
12	Machmud Murdiyanto,S.S.T	Penata ,III/c	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah

13	Ida Sekarsari,S.T.,M.Eng	Penata, III/c	Kepala seksi Tata Kelola E-Government
14	Hettik, S.T.,M.Eng	Penata ,III/c	Kepala seksi Pengelolaan Data dan Statistik
15	Rachmanto, S.S.T.	Penata Tk I,III/d	Kepala Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik
16	Mudjijana,S.S.T	Penata, III/c	Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi
17	Zain Arrifa'i,ST	Penata, III/c	Pranata Komputer Muda
18	Nuraini Dwi Utami,S,Kom	Penata Muda Tk I, III/b	Pranata Komputer Pertama
19	Beni Wiyatno	Penata Muda Tk I,III/b	Operator Sandi dan Telekomunikasi
20	Irfan Budi Santoso,S.ST	Penata Muda Tk I, III/b	Analis Statistik
21	Wiwik Wibowo,S.P	Penata Muda Tk I,III/b	Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi
22	Rujiyanto,S.IP	Penata Muda Tk I, III/b	Analis Tata Laksana
23	Aris Setyaningsih, A.Md	Penata Muda, III/a	Bendahara
24	Prabandari Retno Dewi,A.Md	Penata Muda, III/a	Pengelola Data
25	Peni Nopiyah,S.Kom	Penata MudaI,III/a	Pranata Komputer Pertama
26	Emanuel Tegar Wibisono, S.Kom	Penata Muda , III/a	Pranata Komputer Pertama
27	Nabila Sholihah, S.kom	Penata Muda , III/a	Pranata Komputer Pertama
28	Irfan Masyhudi, S.Kom	Penata Muda , III/a	Analis Informasi
29	Novita Irayanti, S.T.	Penata Muda , III/a	Analis Persandian
30	Rahman Yoga Wijaya, S.Kom	Penata Muda , III/a	Analis Pengembangan Infrastruktur
31	Jarot Achid Alvian, S.Kom	Penata Muda , III/a	Analis Sistem Informasi
32	Sigit Ardian,S.Kom	Penata Muda,III/a	Calon Analis Persandian
33	Baswara Indu Diwasasri,S.Kom	Penata Muda,III/a	Calon Ahli Pertama - Pranata Komputer
34	Syifaa Shaabirina Lissalmi,S.I.Kom	Penata Muda,III/a	Calon Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat
35	Miza Zuda Nurlael,,S.Kom	Pengatur Tk I, III/a	Analis Pengembangan Infrastruktur
36	Supardi	Pengatur Tk I, II/d	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi

37	Subarjo	Pengatur Tk I, II/d	Pengadministrasi Umum
38	Sarjan	Pengatur Tk I, II/d	Pengadministrasi Umum
39	Isnoor Laksana, A.Md.	Pengatur, II/c	Pengelola Teknologi Informasi
40	Budiyanto	Pengatur,II/c	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
41	Redys Febrianti,A.Md	Pengatur, II/c	Calon Pelaksana/Terampil - Arsiparis
42	Anis Maulani Khairun Nisa,A.Md	Pengatur, II/c	Calon Pelaksana/Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat
43	Kresna Rakhman Hutama,A.Md	Pengatur, II/c	Calon Pelaksana/Terampil - Pranata Komputer
44	Jeffri Junianto Suharno,A.Md	Pengatur, II/c	Calon Pelaksana/Terampil - Pranata Komputer
45	Muhammad Ibnu Khoir,A.Md	Pengatur, II/c	Calon Pengelola Sistem dan Jaringan
46	Sudiman	Pengatur Muda Tk I,II/b	Pengadministrasi Umum

Sumber : Sub Bagian Umum dan kepegawaian, 2022

Berdasarkan data per Desember 2022 jumlah pegawai dapat diperoleh kondisi dan data selengkapnya sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel I.2

Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	0
2	SMP	0
3	SMA/SMK	6
4	DI	0
5	D2	0
6	D3	5
7	D4/S1	26
8	S2	6
JUMLAH		46

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Komposi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut :

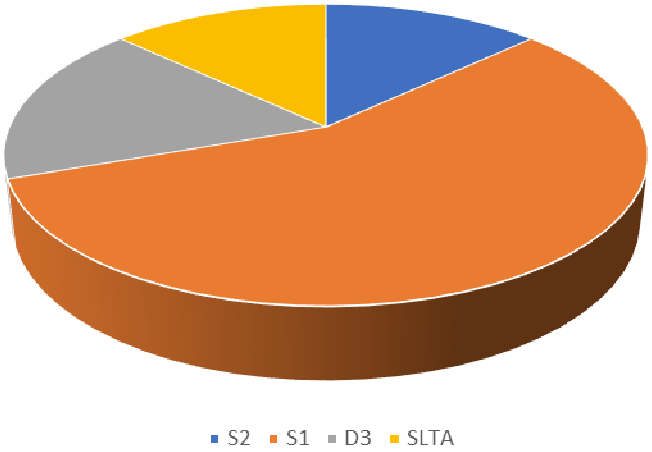

Gambar I.2

Grafik jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan

b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan I	0
2	Golongan II	11
3	Golongan III	30
4	Golongan IV	5
JUMLAH		46

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

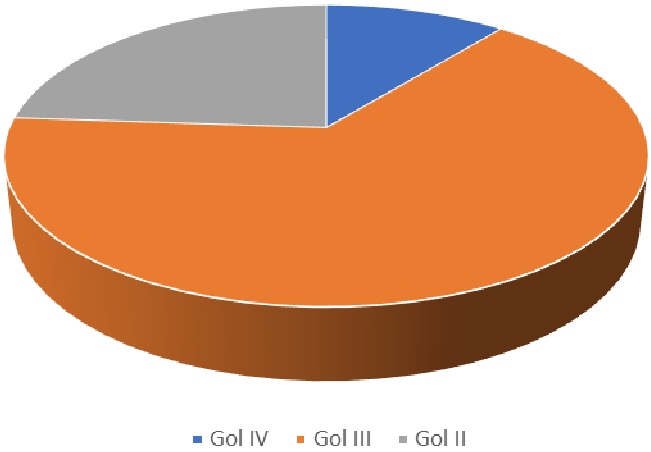

Gambar I.2
Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

c. Jumlah ASN yang menduduki eselon dan staf

Tabel I.4 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

NO	Jabatan	JUMLAH
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	1
3	Eselon III b	3
4	Aselon IV a	9
5	Staf	24
6	CPNS	8
Jumlah		46

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Eselon merupakan tingkat jabatan struktural, eselon tertinggi sampai dengan Eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

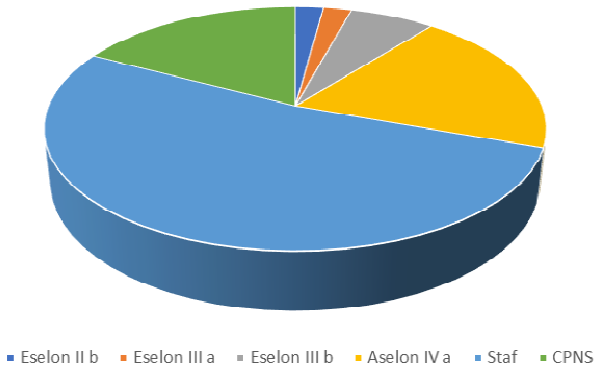

Gambar I.3

Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

d. Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis Kelamin

Tabel I.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jabatan	JUMLAH
1	Laki-Laki	24
2	Perempuan	19
Jumlah		43

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Komposi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut :

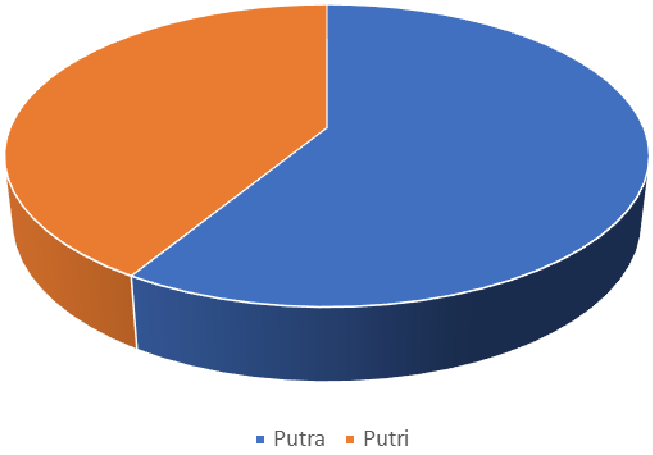

Gambar I.4
Grafik Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis Kelamin

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas kinerja.

D. Isu Strategis

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang
2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Terbatasnya infrastruktur TIK, belum adanya regulasi pengembangan *E-Government* dan master Plan IT yang mendukung *Bantul Smart City* , juga Belum Meratanya Sistem Jaringan Komunikasi
2. Tata kelola data yang belum baik, Sistem informasi dan database belum saling terintegrasi
3. Kurangnya SDM teknis pengamanan informasi, kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi, belum diterapkannya Standar Nasional Manajemen Keamanan Informasi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2016-2021.

1. Pernyataan Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pimpinan Daerah. Kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Adapun Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang meliputi 6 unsur utama yaitu:

a. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
b. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
c. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
d. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

e. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
f. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dari enam visi tersebut, unsur cerdas merupakan unsur yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang dimanifestasikan dalam Konsep Bantul Smart City, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas.

2. Pernyataan MISI:

Dalam Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2017 tentang RPJMD, terdapat 5 misi yang merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Bantul, Yaitu:

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi**
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Misi pertama, ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi***, merupakan cascade dari Bupati kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Misi ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN. Sasaran ini dapat diukur dari Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesian Governance Indeks/*)

Langkah strategis untuk mewujudkan pernyataan visi pertama tersebut yaitu melalui pengembangan dan penerapan konsep Bantul Smart City. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika turut berperan dalam membangun Bantul sebagai Kota Cerdas (Bantul Smart City). Konsep Bantul

sebagai kota cerdas (Smart City) adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera dengan mengembangkan serta mengelola berbagai sumberdaya sebagai potensi yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam implementasi konsep Smart City, Pemerintah Kabupaten Bantul tetap memperhatikan potensi yang ada sebagai kekuatan wilayah untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna memacu perekonomian lokal dengan berbagai inovasi dan kreatifitas.

Kabupaten Bantul telah berupaya mewujudkan konsep Smart City dengan melibatkan seluruh stakeholders terutama masyarakat yang tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal dan teknologi, informasi dan komunikasi saling melengkapi dan dikelola dengan baik sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan solusi yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan.

1. Tujuan dan Sasaran

2.1 Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah selama 5 tahun adalah :

1. Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar
2. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik

Sasaran Strategis Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut:

1. OPD menerapkan Digital Government Service (DGS)
2. Kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika

Tabe.II. 1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"**			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran/ IKU**
1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi**	Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	OPD menerapkan Digital Government Service (DGS)	Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)
	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	Kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan dan Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. kebijakan dan Strategi pembangunan Kabupaten Bantul disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Bantul, serta acuan bagi stakeholders terkait dalam partisipasi aktif pembangunan melalui spirit *Makarya Mbangun Deso.*

Misi 1

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai

tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasarn renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisian (berhasil guna), sebagai berikut :

a. Kebijakan

Kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi ini adalah:

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan ,akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal;
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi kerja dan pelayanan publik;
3. Peningkatan pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik

b. Strategi

Memberi dukungan penyediaan infrastruktur dan fasilitas Tehnologi Informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik.

c. Program

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupeten Bantul bertekat mengoptimalkan kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika dan pelayanan *Digital Government Service (DGS)* di Kabupaten Bantul, Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupeten Bantul sebagai berikut :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Tabel.II.2

Strategi dan Kebijakan Dinas Komuniasi dan Informatika

Visi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	OPD menerapkan Digital Government Service (DGS)	1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK 2. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian 3. Pembangunan Warehouse data dan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian 4. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan	Menerapkan layanan *Digital Government Servis* di seluruh Instansi Pemerintah Daerah
Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	Kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Mengaplikasikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004, yang dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliable, sebagai dasar pengukuran IKM	Menerapkan TIK dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif dalam upaya peningkatan kualitas

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika. 2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Komuniasi dan Informatika mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome)* berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan *Digital Government Services*

2	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	Indeks kualitas layanan informasi publik

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komuniasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2017 Dinas Komuniasi dan Informatika melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada *esakip.bantulkab.go.id,*

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2020, IKU dan APBD. Dinas Komuniasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 368547
Website: diskominfo.bantulkab.go.id email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 01 November 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Bupati Bantul	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
H. ABDUL HALIM MUSLIH	Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T
	NIP. 196704031994032008

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan *Digital Government Service* (DGS)	%	85	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	85
2.	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	Index kualitas layanan informasi publik	%	80	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	80

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.317.002.352
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.301.063.000
5.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Aplikasi Informatika	Rp. 9.765.845.402
6.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi		
7.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		
8.	Program Penyajian Data Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 155.150.000
9.	Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 1.269.736.500
10.		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 288.636.780
	Jumlah Anggaran		**Rp. 20.097.434.034**

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 01 November 2021

PIHAK KEDUA Bupati Bantul	PIHAK PERTAMA Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
H. ABDUL HALIM MUSLIH	Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T NIP. 196704031994032008

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Komuniasi dan Informatika. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1.	Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2.	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *Good Governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	

4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	85	100	117.64%
2	Indeks kualitas layanan informasi publik	80	83.77	104,71%

Sumber :Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian indikator kinerja utama Dinas Komuniasi dan Informatika Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 111.05%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komuniasi dan InformatikaKabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan

Kinerja tahun 2021 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2021. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2021 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, *output dan outcome.*

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi/Rencana *100%

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul mempunyai 2 indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan *Digital Government Service* (DGS)
2. Indeks kualitas layanan informasi publik

1. Sasaran Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar

Terciptanya kota cerdas *(Smart City)* merupakan idaman dan impian bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota. Kota Cerdas merupakan tatanan pengelolaan pemerintahan daerah yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performa dan kesejahteraan, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi sumber daya serta untuk lebih terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Kota cerdas ekonomi, yaitu kota yang ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk layanan Teknologi Informasi Komunikasi, tata kelola dan peran sumber daya manusia yang baik. Kota cerdas secara sosial apabila masyarakatnya memiliki keamanan,

kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Sedangkan kota cerdas lingkungan apabila warganya memiliki tempat tinggal yang layak huni, sehat, hemat dalam penggunaan energi serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan Teknologi Informasi Komunikasi, pengelolaan dan peran sumber daya manusia yang baik.

Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan bahwa "e-*Government* merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi". Melalui e-*Government* akan menjamin terjalinnya hubungan yang efektif, efisien, akuntabel, bersih dan transparan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta Pemerintah Daerah dengan pelaku bisnis. Terjalinnya sistem yang baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat tersebut merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik atau "*good governance*" untuk menuju terciptanya *Bantul Smart City*.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana prasarana yang melengkapi warehouse data (*Network Operational Center*), jaringan LAN, jaringan WAN, ruang pelatihan dan perangkat komputer beserta perlengkapannya.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 85, realisasi sebesar 100 tercapai 117.64% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 86.27 atau tercapai sebesar 101.49%, maka capaian tahun 2021 meningkat sebesar 1.82 %

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 85% Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 117.64% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian				2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan *Digital Government Services*	70.33	77.70	80,69	86.27	85	100	117.64 %	85	117.64%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar dari tahun pelaksanaan 2017- 2021, dan Tahun akhir renstra 2021 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

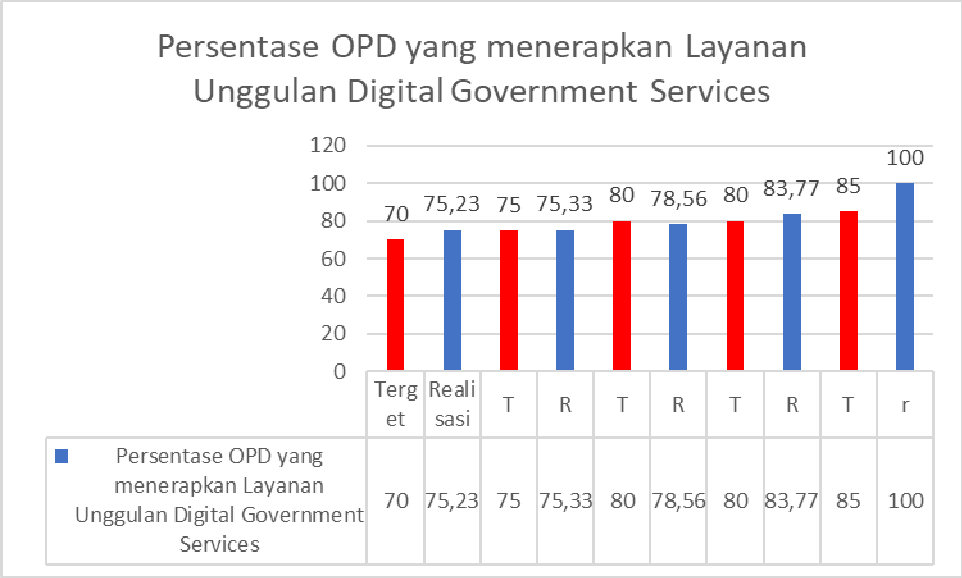

Gambar III.1

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran IKU Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan *Digital Government Services*

Dari grafik diatas terlihat, indikator kinerja sudah on *the track* mendekati rencana kerja yang ingin di capai di tahun akhir renstra tahun 2021.

Nilai capaian indikator Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS) diukur dengan cara menghitung jumlah kumulatif dari 4 unsur penilaian, yaitu:

A Unsur Infrastruktur dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang terkoneksi}}{\text{Target OPD}} = \frac{45}{45} \quad 100\% \quad 100\%$$

B Bobot unsur aplikasi dengan formula

$$\frac{\text{Jumlah Aplikasi terbangun}}{\text{Kebutuhan aplikasi dasar}} = \frac{114}{114} \quad 100\% \quad 100\%$$

C Bobot unsur SDM dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah SDM berbasis IT}}{\text{Kebutuhan SDM IT}} = \frac{95}{95} \quad 100\% \quad 100\%$$

D Bobot Unsur Regulasi dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah regulasi yang ada}}{\text{Jumlah yang harus ada}} = \frac{6}{6} \quad 100\% \quad 100\%$$

Dari hasil diatas diperoleh rekapitulasi sebagai berikut :

NO	Unsur penilaian	Nilai
1	Unsur Infrastruktur	100%
2	Unsur Aplikasi	100%
3	Unsur SDM IT	100%
4	Unsur Regulasi	100%
	Rata-rata penilaian	**100%**

Dari target capaian IKU 2021 sebesar 85, dapat direalisasikan sebesar 100% (117.64%) melampaui target.

Faktor pendorong dari terpenuhinya capaian ini adalah:

(1) Tersedianya Layanan *Bandwith* untuk menunjang pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bantul

Pelayanan bandwith bagi seluruh Pemerintah Kabupaten Bantul tersentral di Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan kapasitas saat ini mencapai 850 mbps. Bandwith ini dibagi untuk seluruh titik yang memanfaatkan koneksi internet dan intranet dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembagian bandwith dilakukan berdasarkan kebutuhan tidak dibagi secara merata.

(2) Terpeliharanya jaringan *Local Area Network* (LAN)

Pengelolaan jaringan internet dan intranet bagi seluruh OPD hingga ke Kalurahan baik sisi LAN untuk klien maupun sisi WAN yang menghubungkan koneksi pusat ke seluruh OPD dan Kalurahan. Saat ini total titik yang terlayani sebanyak 222 titik, yang terdiri atas OPD, Unit

Pelaksana Teknis , Kalurahan , Puskesmas dan beberapa Sekolah.

(3) Tersedianya jaringan backbone pemerintah Kab. Bantul

Perancangan pembangunan backbone merupakan persiapan sebelum pelaksanaan pembangunan *backbone* sebagai kelanjutan kegiatan tahun 2017, untuk menghubungkan jalur utama yang melewati Kapanewon, Kalurahan dan Puskesmas.

Perancangan ini menghasilkan dokumen rancangan jalur yang harus dibangun untuk Kapanewon dan puskesmas yang belum terjangkau di tahun 2020.

(4) Meningkatnya kapasitas jaringan internet dan intranet.

Peningkatan kapasitas jaringan dilakukan melalui pengadaan peralatan jaringan internet dan radio wireless yang selesai dilaksanakan pada triwulan II dengan pemilihan penyedia melalui lelang cepat. Peningkatan kapasitas berupa penambahan akses wifi bagi pelayanan kepada masyarakat di 17 Kapanewon.

(5) Pembangunan jaringan backbone baru.

Pembangunan *backbone* sampai tahun 2018 adalah sepanjang 135 Km. Sementara itu untuk tahun 2019 telah dibangun sepanjang 53 KM sehingga total backbone yang telah dibangun sampai akhir tahun 2019 adalah 188 KM. Setelah refocusing anggaran penanganan Covid-19 pembangunan backbone 2020-2021 di tiadakan.

(6) Meningkatnya kapasitas jaringan *Wide Area Network* (WAN)

Peningkatan kapasitas jaringan WAN dilakukan untuk mengoptimalkan konektifitas di sisi WAN mengingat semakin meningkatnya sisi akses pada klien. Peningkatan kapasitas WAN juga dilakukan untuk optimalisasi pemanfaatan bandwith di masing-masing titik akses.

(7) Meningkatnya kapasitas *warehouse* data

Peningkatan kapasitas warehouse data untuk menampung layanan hosting bagi seluruh OPD di Kabupaten Bantul. Peningkatan kapasitas ini dengan melakukan pengadaan server baik server yang diletakkan di Data Center Kabupaten Bantul maupun pengadaan Server DRC yang akan dimanfaatkan untuk Backup Data. Pengadaan server dilakukan dengan *e-purchasing*. Kapasitas yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2021 sebesar 50 terrabyte.

(8) Integrasi Aplikasi

(9) Pembangunan Aplikasi Bantul Smart Service

(10) Pemeliharaan Aplikasi

(11) Pembuatan Aplikasi / Software

Aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2021 yaitu :

1. Aplikasi Ikutvaksin.
2. Aplikasi Jaring Aspirasi Masyarakat.
3. Aplikasi E-Surat Bantul Mobile Based.
4. Aplikasi Bantulpedia
5. Aplikasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
6. Aplikasi eRetribusi Menara Telekomunikasi
7. Aplikasi Metadata Statistik
8. Aplikasi Whistle Blowing System
9. Aplikasi eAudit
10. Aplikasi Simbersama DLH
11. Aplikasi Bantul Online Shop
12. Aplikasi Siapkesos Dinsos
13. Portal Bantulkab
14. Portal Smartcity
15. Portal Covid-19

(12) Monitoring Implementasi Smartcity

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Smart City

Kabupaten Bantul tahun 2021, yang meliputi 6 dimensi yakni smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment.

Indeks kematangan dimensi smart city dari enam dimensi tersebut, smart society mendapatkan skor 54%, smart living 54%, smart government 68%, Smart environment 100%, smart economy 42 %, kemudian smart branding 57%.

(13) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK). Sistem ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya meningkatkan indeks SPBE yang dimiliki.

Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government, disebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional yang dikenal dengan sebutan SPBE.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, indeks SPBE Kabupaten Bantul mencapai 3.62 (sangat baik) dari skala 5 dengan predikat sangat baik. Ini menunjukkan peningkatan signifikan yakni, 0,38 dari indeks sebelumnya yaitu 3.24 (baik) pada tahun 2019, dan di tahun 2018 indeks SPBE sebesar 1,84 (cukup)

Tabel 2.111 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks SPBE	n/a	n/a	1,84 (cukup)	3,24 (baik)	3,24 (baik)	3.62 (sangat baik)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul, 2021

Penilaian Pemerintah Kab. Bantul tahun 2021 dengan menggunakan instrumen penilaian terbaru, yaitu menggunakan instrumen penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menggunakan 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator, dimana terdapat 23 Indikator baru. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam paragraf Tujuan Pengembangan SPBE yang diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Pemerintah Kabupaten Bantul pun terus berbenah, terus bertekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hingga akhirnya di tahun 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Keputusan Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, dimana Indeks SPBE Kabupaten Bantul mendapatkan angka 3,62 dengan predikat Sangat Baik, dimana angka ini adalah tertinggi pada tingkat kabupaten/kota se Indonesia

Permasalahan:

Terkait dengan Permasalahan indikator *Digital Government Service* (DGS) ini, masih banyak infrastruktur penunjang yang harus dipenuhi guna mewujudkan Bantul Smart City, diantaranya adalah:

Permasalahan	Solusi
1. Terbatasnya infrastruktur TIK dan Belum meratanya sistem jaringan komunikasi di Kabupaten Bantul, terutama untuk menjangkau sekolah.	1. Membangun jalur utama jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul dengan teknologi *Fiber Optic* Sampai Kalurahan yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai sarana implementasi SPBE

2. Belum adanya regulasi pengembangan *e-government* dan *master Plan IT.*	2. Menyusun masterplan TIK sebagai dasar pelaksanaan pembangunan TIK di Kabupaten Bantul

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan
b. Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

1. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
   a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
      2) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
      3) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
      4) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
   a) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   b) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
      2) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Sasaran Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik

Indeks kualitas layanan informasi publik merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Peraturan Bupati Bantul No. 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memberi gambaran seberapa pentingnya perangkat daerah harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya. dengan mengukur Indeks kualitas layanan informasi publik bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis

dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.Sampai dengan akhir Tahun 2020 diperoleh hasil survey Indeks Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi dengan kesimpulan angka sebesar 83,77 dengan kategori “B” Baik.

Tabel Error! No text of specified style in document.**4**
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
						Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks kualitas layanan informasi publik	75,23	75.33	78,56	83.03	80	83.77	104,71%	80	104,71%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 80 realisasi sebesar 83.77 tercapai 104,71% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebelumnya sebesar 83.03 atau tercapai sebesar 103.37 maka capaian tahun 2021 meningkat 1.34% dari tahun sebelummya. Nilai pada tahun 2021 (akhir renstra) turun menjadi 80 karena pada tahun 2021 terjadi refocusing anggaran yang berakibat menurunnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung iku indeks kualitas layanan informasi public.

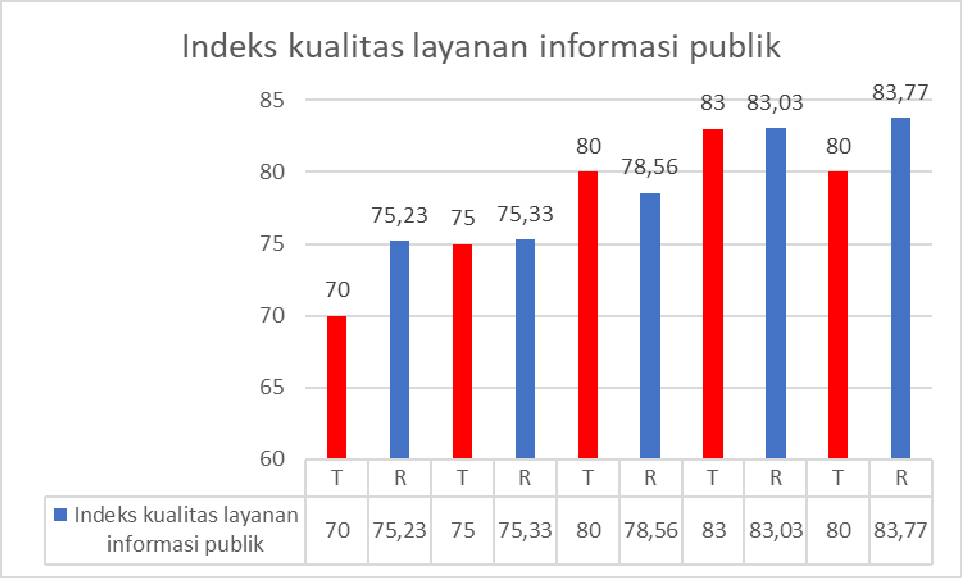

Gambar III.2
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran IKU Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) dengan nilai Indeks kualitas layanan informasi publik 80, Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 104,71% dari target akhir Renstra tahun 2021. Pada pada perubahan renstra 2016-2021 dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul menurunkan nilai IKU dari semula 85 menjadi 80 karena pada tahun 2021, anggaran yang digunakan untuk program dan kegiatan yang mendukung IKU Indeks kualitas layanan informasi public berkurang secara signifikan akibat refocusing untuk penanganan pandemi covid 19.

Dalam melaksanakan kegiatan urusan komunikasi dan desiminasi informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika, memanfaatkan media komunikasi yang paling banyak dipilih dan digunakan masyarakat sesuai dengan trend yang berkembang dimasyarakat terkini, diantaranya meliputi:

(1) Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif proses penyebaran atau distribusi informasi publik kepada masyarakat. Selain itu informasi dan data yang diperoleh juga sangat penting dalam merumuskan strategi komunikasi di tahun-tahun berikutnya. Untuk menyimpulkan disusun sebuah indek yang diberi nama Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik di Kabupaten Bantul. Penyusunan indek ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga agar didapat nilai yang obyektif dari masyarakat. Untuk tahun 2021 Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik di Kabupaten Bantul mencapai 83,77.

Gambar.III.3 Dokumen Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik di Kabupaten Bantul.

Secara lebih detail nilai pada setiap unsur dalam penilaian indek kepuasan layanan informasi publik ini sebagai mana dalam gambar berikut :

No	Indikator	Rata-rata unsur	Bobot	Rata-rata unsur x bobot
1	Kualitas Sistem Informasi Kabupaten Bantul	3,36	25	84,07
2	Kualitas Informasi Kabupaten Bantul	3,34	25	83,55
3	Kualitas Layanan Informasi Kabupaten Bantul	3,24	25	81,06
4	Kepuasan Pengguna Informasi Kabupaten Bantul	3,455	25	86,38
Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik				83,77

Dari tabel tersebut terlihat bahwa, nilai terendah dari nilai rata- rata tiap unsur ada pada kualitas layanan informasi Kabupaten Bantul. Hal ini memperlihatkan bahwa, saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki kelemahan di segi kualitas layanan informasi.

Sedangkan pelayanan dengan nilai tertinggi adalah kepuasaan pengguna informasi Kabupaten Bantul. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berusaha memberikan pelayanan terbaik, sehingga masyarakat memiliki kepuasan dalam menggunakan informasi yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

(2) Peliputan

Dalam rangka memberikan informasi tentang upaya-upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, dilakukan peliputan. Hasil peliputan yang berupa berita dan dokumentasi yang berupa foto dan

video di upload / dipublikasikan melalui website bantulkab.go.id dan media sosial yaitu facebook Pemkab Bantul, instagram pemkabbantul, twitter @pemkabbantul dan channel youtube Bantul TV.

Gambar III.4 Tampilan landing page website bantulkab.go.id

Gambar III.5 Pelaksanaan kegiatan peliputan

Gambar III.6 Tampilan berita dalam website bantulkab.go.id

Gambar III.7 Facebook Pemkab Bantul Instagram Pemkab Bantul

Gambar III.8 Twitter Pemkab Bantul Channel Youtube Bantul TV

(3) Pengelolaan Aduan melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N

Untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan, Kabupaten Bantul telah menyediakan aplikasi online yang dapat diakses setiap saat yang dikenal dengan aplikasi Lapor Bantul. Adapun aduan yang masuk sampai dengan akhir 2021 adalah sebanyak 199 aduan yang telah mendapat tanggapan / jawaban dari OPD yang terkait dan yang belum ditanggapi 1. Selain aplikasi Lapor Bantul, dari Kementerian PAN dan RB juga mengeluarkan aplikasi Lapor yang wajib dikelola oleh seluruh instansi pemerintah dengan alamat lapor.go.id, dengan jumlah aduan yang masuk sampai dengan akhir 2021 berjumlah 96 aduan yang semuanya sudah mendapat tanggapan dari Perangkat Daerah terkait.

Rekap Aduan SP4N-LAPOR! Tahun 2021

NO	INSTANSI	JUMLAH ADUAN
1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Bantul	3
2	Kanwil Bantul	0
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	5
4	Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Bantul	1
5	Sekretariat DPRD Bantul	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2
7	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	2
8	Bagian Administrasi Kesra	0
9	Bagian Administrasi Pembangunan	0
10	Bagian Administrasi Pemerintahan	0
11	Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan	0
12	Bagian Administrasi Perekonomian	0
13	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	0
14	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1

15	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	1
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bantul	18
20	Dinas Kebudayaan	0
21	Dinas Perdagangan	1
22	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6
23	Dinas Perhubungan	9
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian	0
25	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1
26	Dinas Pariwisata	0
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0
28	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	3
29	Dinas Pertanian, Pangan, Kelauatan Dan Perikanan	2
30	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	4
31	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	24
32	Bagian Hukum	0
33	Bagian Humas Dan Protokol	0
34	UPT Jamkesda Dinkes	0
35	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	0
36	Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	0
37	Bagian Organisasi	0
38	PDAM Bantul	2
39	Rsud Panembahan Senopati	0
40	Bagian Umum	0
41	Kapanewon Bantul	4
42	Kapanewon Pleret	0
43	Kapanewon Banguntapan	2
44	Kapanewon Dlingo	1
45	Kapanewon Imogiri	1
46	Kapanewon Jetis	2
47	Kapanewon Kretek	0
48	Kapanewon Kasihan	1

49	Kapanewon Pandak	0
50	Kapanewon Pundong	0
51	Kapanewon Srandakan	0
52	Kapanewon Piyungan	0
53	Kapanewon Pajangan	1
54	Kapanewon Sanden	0
55	Kapanewon Bambanglipuro	0
56	Kapanewon Sewon	0
57	Kapanewon Sedayu	0
58	Badan Pertanahan Nasional Kab Bantul	0
59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan	1

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 2021

Dari data di atas, diperoleh aduan masyarakat melalui kanal Lapor Bantul sebanyak 93 laporan dan dari SP4N-LAPOR! Sebanyak 102 laporan. Semua laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi OPD dengan aduan tertinggi yaitu sebanyak 24 aduan SP4N-LAPOR! dan 21 aduan Lapor Bantul. Aduan terbanyak adalah tentang kerusakan jalan raya. Semua aduan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan survey lokasi jalan rusak, kemudian melakukan perbaikan berupa pengaspalan maupun penambalan jalan. Jika jalan tersebut bukan jalan kabupaten, Dinas PUPKP melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar dapat dilakukan tindaklanjut.

Dinas Perhubungan juga menjadi OPD yang mendapatkan aduan cukup banyak, yaitu 17 aduan Lapor Bantul dan 9 aduan SP4N-LAPOR! Aduan meliputi kerusakan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas) dan kerusakan ataupun

permohonan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum. Semua aduan telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan di sejumlah titik kerusakan yang dilaporkan oleh masyarakat. Jika titik lokasi yang diadukan bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, maka dilakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Dinas Sosial mendapatkan 18 aduan SP4N-LAPOR! dengan kategori permintaan bantuan sosial. Adanya pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2021 ini, menyebabkan bertambahnya permasalah yang terjadi di masyarakat, terutama permasalahan ekonomi. Bantuan sosial menjadi angin segar bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, namun distribusi bantuan yang kurang merata juga menyebabkan permasalah baru.

Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjadi Perangkat Daerah yang menerima banyak aduan dari masyarakat. Permasalahan sampah dan limbah masih banyak terjadi saat ini. Ketertiban lingkungan terutama yang berkaitan dengan adanya pembatasan masyarakat sepanjang tahun 2021 juga menjadi perhatian tersendiri. Sedangkan permasalahan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan perpindahan maupun perubahan status pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) banyak ditanyakan oleh masyarakat.

Pandemi c*ovid-19* yang terjadi dua tahun terakhir ini menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat dan anjuran pemerintah untuk di rumah saja membuat masyarakat lebih sering mengakses informasi melalui gawai. Hal itu juga yang mempengaruhi banyaknya aduan di beberapa Perangkat Daerah tertentu. Permintaan informasi, dugaan kecurangan penyaluran bantuan sosial, dan pelanggaran ketertiban masyarakat saat terjadinya pembatasan menjadi permasalahan yang banyak dilaporkan di Kabupaten Bantul.

Sedangkan permasalahan yang rutin terjadi seperti kerusakan jalan raya, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APILL), serta permasalahan sampah dan limbah usaha, mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah dan Kapanewon dalam menindaklanjuti aduan juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk selalu memanfaatkan kanal aduan yang ada untuk menyampaikan ketidakpuasannya. Sedangkan pengelolaan media sosial Pemerintah Kabupaten Bantul maupun Perangkat Daerah dan Kapanewon yang semakin baik juga membuat masyarakat mempunyai lebih banyak pilihan untuk mengadukan permasalahannya.

Selain itu juga meningkatnya pelayanan masyarakat saat ini juga menjadi penyebab menurunnya aduan masyarakat melalui kanal Lapor Bantul maupun SP4N- LAPOR!. Dari data

yang ada, pada Tahun 2021 total aduan sebanyak 368 aduan terdiri dari 199 aduan melalui Lapor Bantul dan 169 aduan melalui SP4N-LAPOR!, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 195 aduan yang terdiri dari 93 aduan melalui Lapor Bantul dan 102 aduan melalui SP4N-LAPOR!.

Evaluasi dan koordinasi selalu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan pengaduan. Sebanyak 45 Perangkat Daerah dan Kapanewon, serta BUMD di Kabupaten Bantul mengikuti evaluasi dan koordinasi dengan tema “Membangun Etika di Era Citizen Journalism”. Dihadirkan pula narasumber yang kompeten di bidangnya. Pada kesempatan itu, juga diberikan apresiasi kepada beberapa Perangkat Daerah dengan aduan terbanyak agar pengelola lebih semangat dan semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

(4) Publikasi Kegiatan di Media Cetak

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan publikasi berbagai macam kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat diketahui oleh masyarakat secara lebih luas yaitu melalui media cetak. Pada tahun 2021 jumlah publikasi kegiatan di media cetak dilakukan sebanyak 16 kali.

Pelaksanaan publikasi di media cetak dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa media yang ada di Kabupaten Bantul antara lain Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja, Harian Jogja dan Radar Jogja

(5) Publikasi Kegiatan di Media Masa Online

Sejalan dengan perkembangan penggunaan media online oleh masyarakat dalam mengakses informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten juga melakukan publikasi melalui media online. Publikasi melalui media massa online ini pada tahun 2021 dilakukan sebanyak 20 kali tayang.

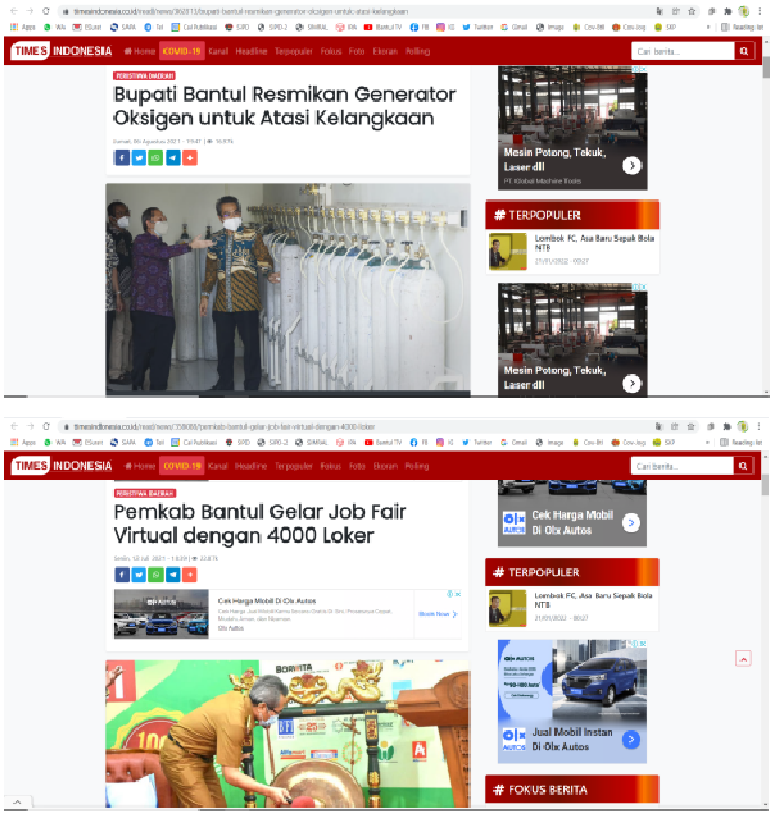

Gambar III. 9 Publikasi Kegiatan di Media Masa Online

(6) Iklan Media Sosial Pemkab

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam melakukan publikasi informasi kepada masyarakat, salah satunya dilakukan melalui media sosial. Agar pelaksanaan publikasi melalui media sosial ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan media sosial yang memiliki jumlah follower / anggota yang dapat menjangkau sebagian besar masyarakat

Kabupaten Bantul. Untuk meningkatkan jumlah follower, engagement dan penetrasi kepada masyarakat dibutuhkan program iklan di masing-masing media sosial yang dikelola.

Adapun dampak dari program iklan yang dijalankan di media sosial Pemkab Bantul dapat dilihat dalam gambar berikut :

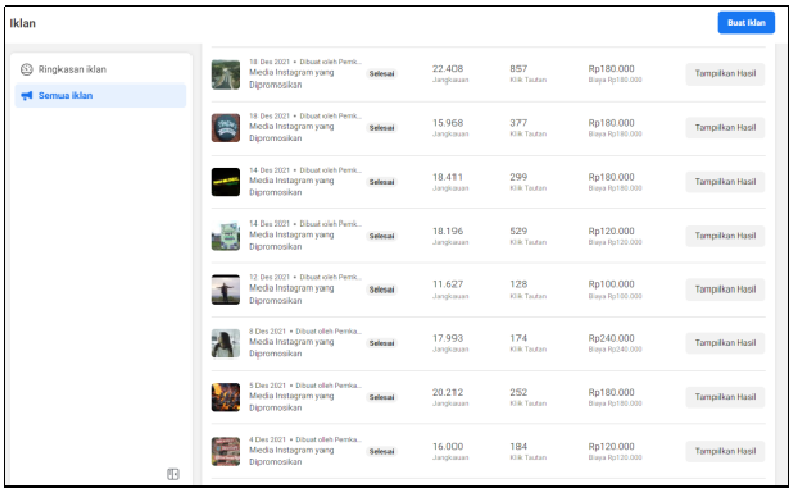

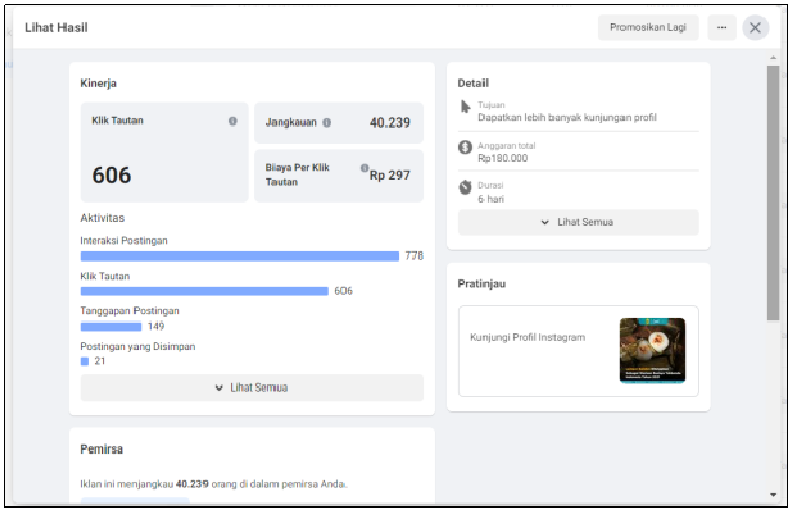

Gambar III. 10 dampak dari program iklan yang dijalankan di media sosial Pemkab Bantul

(7) Workshop Pengelola Grup Netizen Lokal Bantul

Dalam pelaksanaan publikasi informasi baik kepada masyarakat Kabupaten Bantul maupun publikasi potensi Kabupaten Bantul kepada masyarakat luar, Dinas Komunikasi dan Informatika menggandeng berbagai grup netizen

lokal Bantul yang turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan publikasi tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan dialog dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang pengelolaan media sosial. Namun demikian dikarenakan Pandemi Covid 19, kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan 1 kali di tahun 2021

Gambar III. 11 Workshop Pengelola Grup Netizen Lokal Bantul

Selain itu juga diberikan penghargaan berupa kamera digital kepada 3 grup netizen lokal Bantul terfavorit, yang dipilih oleh dewan juri dari pihak independen berdasarkan berbagai kriteria yang ditetapkan.

Gambar III. 12 Penyerahan Penghargaan kepada Grup Netizen Lokal Bantul Terfavorit

(8) Lomba video Bantul Bangkit

Menyambut bangkitnya kembali Kabupaten Bantul ditengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan kampanye #BantulKiniBangkitKembali untuk memberikan semangat kepada Masyarakat agar tetap berjuang melawan pandemi ini, dengan mengadakan Bantul Video Competition.

Gambar III. 13 Lomba video Bantul Bangkit

Lomba ini diikuti oleh 56 peserta sesuai dengan jumlah yang mengirimkan karya video. Adapun pemenang dari Lomba Video Bantul Bangkit ini adalah sebagai berikut :

Gambar III. 14 Pemenang Lomba video Bantul Bangkit

(9) Siaran Langsung Taman Paseban di TVRI Jogja

Siaran televisi yang dilaksanakan meliputi Siaran Taman Paseban, yang merupakan siaran langsung di TVRI stasiun Yogyakarta, disiarkan secara live Hari Selasa pukul 17.00 – 18.00 terdiri 6 episode. Model siaran adalah *talk show* dengan dialog interaktif dengan pemirsa.

Gambar III. 15 Siaran Langsung Taman Paseban di TVRI Jogja

(10) Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat

Pada tahun 2021 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul membuat Video Iklan Layanan layanan masyarakat sejumlah 1 buah yang berisi tentang larangan anak usia dini mengendarai kendaraan bermotor.

Adapun video iklan tersebut kemudian dipublikasi melalui media sosial Pemkab

Bantul, baik Facebook, Instagram, twitter dan youtube dengan link https://youtu.be/K0imhIvPWH4

Gambar III. 16 Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat

(11) Penerbitan Buletin Sejada

Kegiatan yang dilakukan adalah menerbitkan Buletin Sejada dengan tujuan sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan masyarakat lewat media cetak yang penyebarannya sampai ke tingkat dusun melalui Kapanewon. Dalam tahun 2021 diterbitkan 12 (enam) kali edisi. Outcome-nya adalah tersosialisasikannya program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul dampaknya masyarakat bisa mengetahui dan memahami program kerja

dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 ini dikarenakan keterbatasan anggaran, maka Majalah Sejada di publish secara online dan disebarkan melalui laman www.bantulkab.go.id maupun platform-platform lain yang tersedia..

Gambar III. 17 Buletin Sejada

(12) Siaran Saba Desa TVRI Jogja

Selain Taman Paseban, ada juga yang disiarkan secara tunda (taping) yaitu Saba Kalurahan. Program Taping Saba Kalurahan dilaksanakan sebanyak 2 episode adalah kerjasamanya dengan TVRI Stasiun Yogyakarta dengan mengangkat tema-tema kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai OPD di Kabupaten Bantul. Sebagai sarana sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Kabupaten Bantul.

Gambar III. 19 Siaran Saba Desa TVRI Jogja

(13) Siaran Leyeh-leyeh RBTV

Kemudian program lain yang melalui televisi adalah bekerjasama dengan RB TV dengan acara Leyeh-leyeh. Sebuah program yang dikemas untuk mempromosikan kelompok atau usaha mikro yang ada di Kabupaten Bantul, sebanyak 4episode di Tahun 2021.

Gambar III. 20 Siaran Leyeh-leyeh RBTV

Secara umum kegiatan yang bekerjasama dengan televisi adalah meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membangun sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya *Good Governance* dan sebagai ajang promosi potensi daerah.

Kendala yang ditemui adalah karena keterlambatan proses lelang acara Taman Paseban dan adanya efisiensi anggaran pada acara siaran televisi swasta luar studio. Selain itu waktu siaran yang masih tergantung dengan TVRI pusat sehingga belum bisa menentukan waktu siaran sendiri yang sesuai untuk bisa meraih perhatian pemirsa (*prime time*). Untuk mengatasi kendala ini dilakukan upaya penyusunan jadwal acara dan tema yang konsisten tidak berubah-ubah dan membuat siaran yang cukup menarik untuk bisa menarik perhatian pemirsa.

(14) Dialog Interaktif di Radio

Kegiatan ini merupakan dialog interaktif dalam satu tahun dengan maksud terjalinnya interaksi dan komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat Bantul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun media radio yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah Radio Sonora, Radio Persatuan, dan Bantul Radio. Kegiatan dialog interaktif pada tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 42 kali/episode. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode jarak jauh atau melalui telepon antara host dan narasumber dikarenakan kondisi wabah Virus Covid-19 yang mulai menyebar. Hasil akhirnya adalah tersosialisasikannya program kerja dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Gambar III. 21 Dialog Interaktif di Radio

(15) Dialog Interaktif Generasi Muda

Dialog generasi muda dilaksanakan dengan menggelar acara di sekolah-sekolah menengah tingkat atas dengan narasumber dari Bupati atau Wakil Bupati, psikolog dan figur entrepreneur. Dialog membahas berbagai hal yang harus dilakukan oleh generasi muda yang saat sedang pada masa mencari jati diri, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Kegiatan dialog interaktif generasi muda ini dilaksanakan sebanyak 6 kali kegiatan.

Gambar III. 22 Dialog Interaktif Generasi Muda

(16) Cetak majalah Promosi Bantul

Dalam rangka mempromosikan potensi Kabupaten khususnya di bidang wisata, kerajinan dan kuliner kepada masyarakat di luar Kabupaten Bantul, pada tahun 2021 disusun majalah potensi Bantul. Majalah ini kemudian didistribusikan di berbagai sarana yang digunakan para wisatawan seperti, Bandar Udara, Stasiun Kereta, Hotel dan lain-lain.

Gambar III. 23 Cetak majalah Promosi Bantul

(17) Liputan Dinamika Pembangunan

Liputan dinamika pembangunan Kalurahan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan kerjasama dengan media massa / para wartawan dalam bentuk peliputan kegiatan Usaha/Perekonomian/UMKM masyarakat yang khas atau unik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar secara ekonomi dan perlu mendapatkan dukungan publikasi media massa baik elektronik atau media cetak.

Gambar III. 24 Liputan Dinamika Pembangunan

*Outcome*nya adalah dipublikasikannya potensi masyarakat Bantul lewat media cetak dan elektronik. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan jumlah omzet dan pemesanan pemilik usaha UMKM yang pada gilirannya nanti adanya peningkatan kunjungan ke Kabupaten Bantul. Volume kegiatan dinamika pembangunan sebanyak 12 (dua belas) kali di Tahun 2021.

(18) Pembuatan Konten / Video berita channel Bantul TV

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan peliputan berita dan pembuatan video yang akan diunggah di channel Youtube Bantul TV. Volume dari kegiatan ini adalah sebanyak 48 konten/berita.

Gambar III. 25 Konten / Video berita channel Bantul TV

(19) Pembuatan Video Profil Bantul

Pada tahun 2021 dilakukan pembuatan vidio Profil Kabupaten Bantul sebanyak 1 buah. Pembuatan video profil ini dititik beratkan pada publikasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bantul yang meliputi Pariwisata, Kerajinan dan Pertanian.

Gambar III. 26 Video Profil Bantul

Hasil pembuatan video profil Kabupaten Bantul dapat dilihat di Channel Youtube Bantul TV dengan link https://youtu.be/wHCxSBFHwBs

(20) Cetak Leaflet

Dalam rangka menyebarkan informasi yang penting kepada masyarakat juga perlu dilakukan dengan menyebarkan leaflet dan menempel poster-poster di tempat yang

strategis. Pada tahun ini poster dan leaflet yang dibuat bertema tentang pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Gambar III. 27 Cetak Leaflet

(21) Pengadaan Papan Reklame

Selain itu untuk menyasar masyarakat yang tidak menggunakan media online, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mulai tahun 2021 juga membangun 5 buah baliho. Adapun titik-titik lokasi pembangunan baliho adalah sebagai berikut :

- Perempatan Jejeran, Pleret, Bantul
- Depan Puskesmas Banguntapan 1
- Lapangan Kalurahan Argosari
- Depan Balai Benih Perikanan Sanden
- Depan Gudang SRG Jl. Bantul

Baliho yang dibangun berdimensi 4 x 6 m yang 2 diantaranya memiliki 2 sisi / muka.

(22) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan Lembaga Komunikasi PerKalurahanan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktifitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambahPengembangan dan pemberdayaan KIM diarahkan untuk :

- Mewujudkan jejaring diseminasi informasi secara nasional;
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
- Membangun masyarakat informasi.
- Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat koordinasi, pertemuan Forum Pemberdayaan KIM Kabupaten, Bimbingan Teknis Optimalisasi Media Sosial untuk Peningkatan Ekonomi bagi KIM di 8 (delapan) titik yaitu :

NO	LOKASI
1	KIM Fastminfo, Karasan, Palbapang, Bantul
2	KIM Sekartaji, Karanggayam, Bantul
3	KIM Tegallayang, Caturharjo, Pandak
4	KIM Guminfo, Gumuk, Ringinharjo, Bantul
5	KIM Gembira, Gemblangan, Ngentak, Timbulharjo, Sewon

6	KIM Migunani, Miri, Pendawaharjo, Sewon
7	KIM Pendopo Dakwah, Gunungsaren, Trimurti, Srandakan
8	KIM Bamantara, Jambean, Triwidadi, Pajangan

-

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 2021

Bimbingan Teknis Pemberdayaan KIM di Era Digital di 16 (enam belas) titik yaitu :

NO	LOKASI
1	Gemblangan, Timbulharjo, Sewon
2	Manding Serut, Sabdodadi, Bantul
3	Triwidadi, Pajangan
4	Gumuk, Ringinharjo, Bantul
5	Karanggayam, Bantul
6	Gunungsaren, Trimurti, Srandakan
7	Palbapang, Bantul
8	Tegallayang, Caturharjo, Pandak
9	Karangmojo, Trirenggo, Bantul
10	Miri, Pendowoharjo, Sewon
11	Ngringinan, Palbapang, Bantul
12	Mandingan, Ringinharjo, Bantul
13	Sangkal, Bangunharjo, Sewon
14	Poncosari, Srandakan
15	Gesikan, Panggungharjo, Sewon
16	Bantulkarang, Ringinharjo, Bantul

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 2021

Jumlah KIM yang saat ini terdaftar di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ada 43 KIM, 29 diantaranya sudah difasilitasi Wi-Fi Publik. Data KIM Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)										
KABUPATEN BANTUL 2021										
								Update:	31 Des 202	
No	**Nama Kelompok**	**Nama Pengurus**			**Alama/Telp/Email**	**KAPANEWON**	**SK Pembentukan**			**Keterangan**
							Nomor	**Tanggal**	**Pejabat**	
1	ARGO PARIWARA	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Semedi Marta, S.Pd Mukhtarom Yovie Kiswidyantoro,S. Pd	Selogedong, Argodadi HP: 085920041444	Sedayu	No. 51 / 2019	11/4/2019	Lurah Kalurahan Argodadi	Sewa
2	ARGO WASKITO	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Sugito,BA Sandiman,S.Pd Marsudi	Kemusuk Lor RT. 01, Argomulyo HP: 081931710737 HP: 08234422640	Sedayu	No. 53 / 2019	12/31/2019	Lurah Kalurahan Argomulyo	
3	BIWARA	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Sudarmanta Ragil Tyas Wiworoyekti,A.Md Kasdijo	Ngabean, Triharjo HP: 085100173004 HP: 081392036977	Pandak	No. 07/2020	02/2/2020	Lurah Kalurahan Triharjo	
4	CEMORO SARI	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Wiyono,S.IP H.Miftah Asrofi Umar,S.Sos Sumaryanto	Blantikan, Ketalo, Gadingsari Telp: 085102145981	Sanden	No. 42 / 2019	11/1/2019	Lurah Kalurahan Gadingsari	Sewa
5	DANA PAWARTA	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Drs. Wisnu Giyono, M.Pd OCQ Frellia AA Ulil Asrofi	Ngranan, Palangjiwan, Donotirto HP: 08156880753 HP: 081393648766	Kretek	No.41 / 2019	12/31/2019	Lurah Kalurahan Donotirto	
6	DONO PAMBYOWORO	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Drs. Sarjono, M.Msdm Drs. Mursana Siti Rokhimah	Mejing, Mulyodadi HP: 085334334327	Bambanglipuro	No. 68 / 2019	11/5/2019	Lurah Kalurahan Mulyodadi	
7	GOKERTEN	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Bekti Santosa Mujiono Haryono	Gokerten, Srigading HP: 087738047300	Sanden	No. 25 / 2019	12/28/2019	Lurah Kalurahan Srigading	

8	GRANDIS	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Jazimah Arif Nur Hidayanto Nazarudin	Mojolegi, Karangtengah HP: 081392229112	Imogiri	No. 43 / 2019	12/12/2019	Lurah Kalurahan Karang Tengah	Sewa
9	GUYUP RUKUN	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Kamrihadi Eko Setyo Raharjo, S.Pd Budi Santoso	Grogol IX, Parangtritis HP: 085647826655	Kretek	No. 48 / 2019	12/13/2019	Lurah Kalurahan Parangtritis	Sewa
10	KRISNA MURTI	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Triyono, A.Md Tukiran, S.AP Mujiman, S.Pd	Buyutan, Gadingsari HP: 085290950914	Sanden	No. 41 / 2019	11/1/2019	Lurah Kalurahan Gadingsari	
11	MALANGAN	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Partini, S.Pd.MA Devi Listiyaningsih Amirudin	Malangan Dk. 13, Srigading HP: 08156873121	Sanden	No. 27 / 2019	12/28/2019	Lurah Kalurahan Srigading	Sewa
12	MARDI RUKUN	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Sugiyanto Pitaya Sri Darsih	Lemahdadi Dk.IV, Bangunjiwo HP: 081328207071 Telp: (0274) 6465030	Kasihan	No. 30 / 2019	12/16/2019	Lurah Kalurahan Bangunjiwo	
13	MEKAR SARI	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Tunem Ekowati Anggi Jatmiko Suyanti	Butuh Lor, Triwidadi HP: 081392344795	Pajangan	No.51 / 2019	11/28/2109	Lurah Kalurahan Triwidadi	
14	MUDO RAHARJO	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Hamdan Septiana Fauziah Akbar Putra Pengestu	Jati, Sriharjo HP: 085725800895	Imogiri	No. 35 / 2019	07/15/2019	Lurah Kalurahan Sriharjo	Sewa
15	NGESTI TRI TUNGGAL	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Ngatijo Haryati Walidi	Jojoran Kulon, Triwidadi HP: 081392625611	Pajangan	No.50 / 2019	11/28/2019	Lurah Kalurahan Triwidadi	
16	NGUDI MAKMUR	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Muji Rahayu Sri Lestari,S.IP Maryati Wasito	Ngebel Dsn. III, Tamantirto HP: 085729169126	Kasihan	No. 50 / 2019	09/26/2019	Lurah Kalurahan Tamantirto	Sewa
17	RATNA SARI	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Sri Suparmi Parjimah Sarjiyem	Polosiyo, Poncosari HP: 085547764894 HP: 081328477670	Srandakan	No. 34 / 2019	10/30/2019	Lurah Kalurahan Poncosari	Sewa
18	SEDYO MULYO	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Sajak Sunardi Parjoko Isman	Trucuk, Triwidadi HP: 085870030076	Pajangan	No.49 / 2019	11/28/2019	Lurah Kalurahan Triwidadi	

19	SEDYO RUKUN	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Drs. Dalyanto Paryadi Dra. Wiwik	Bongsren, Gilangharjo HP: 087839062777	Pandak	No. 47 / 2019	11/18/2019	Lurah Kalurahan Gilangharjo	Sewa
20	SEKAR JAGAD	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Murtini,A.Ma.Pd Rachel Siti Hasanah Rijayanti	Pasutan, Trirenggo HP: 081915531103	Bantul	No.44 / 2019	11/27/2019	Lurah Kalurahan Trirenggo	Sewa
21	SRI REJEKI	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Setiawan Titin Mulyani Wisnu Nugroho	Nangsri, Srihardono	Pundong	No.27 / 2020	02/01/2020	Lurah Kalurahan Srihardono	
22	WARTO MULYO	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Suyanto, S.Pd Tugiman Waridjo	Wunut, Sriharjo HP: 085943784756	Imogiri	No. 27.a /2019	05/9/2019	Lurah Kalurahan Sriharjo	
23	IMOGIRI MULYO	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	H. Subardi,SPKP H. Subardi,M.Pd Asih Purrini	Kalurahan Imogiri HP: 087834347474	Imogiri	No. 52 / 2019	12/2/2019	Lurah Kalurahan Imogiri	
24	RANDU KUNING	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Ade Ahmad Wijaya Adien Ispanura Adha Dhevid Triantoro	Kalurahan Tamantirto	Kasihan	No. 44 / 2020	16/11/2020	Lurah Kalurahan Tamantirto	IBM
25	JITU	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Suparman Surani Fajar Priyanto	Kalurahan Sitimulyo	Piyungan	No. 96 / 2020	05/11/2020	Lurah Kalurahan Sitimulyo	IBM
26	JETIS SEJAHTERA	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Sudamar Ibnu Groho Danu Setiawan Aan Sofyantoro	Kalurahan Tirtomulyo	Kretek	No. 36 / 2020	02/11/2020	Lurah Kalurahan Tirtomulyo	IBM
27	ACITYA DHARMA	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Zaidan Fikri Azhari Novia Nur Wahyuni Wita Meireza	Kalurahan Argorejo	Sedayu	No. 40 / 2020	10/11/2020	Lurah Kalurahan Argorejo	IBM
28	RUMAH BELAJAR 06 GESIKAN	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Riswan Hafidh Fajri Muffida Hanum Yoga Norsetiawan	Kalurahan Panggungharjo	Sewon	No. 32 / 2020	30/11/2020	Lurah Kalurahan Panggungharjo	IBM

29	WES BAROKAH	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Heri Saptono Nida Lathifah Ludfi Gunar	Kalurahan Baturetno	Banguntapan	No. 52 / 2020	16/09/2020	Lurah Kalurahan Baturetno	IBM
30	BONGOS KEREN	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	H. Jupriyanto, S. Si. Risdiyanto Nugroho, S. STP, M. Eng. Rosidal	Kalurahan Gadingsari	Sanden	No. 30 / 2020	11/11/2020	Lurah Kalurahan Gadingsari	IBM
31	MUTIARA HATI	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Yudi Periasa Katrin Surinuarta Mufit Wulandari	Kalurahan Srihardono	Pundong	No. 54 / 2020	16/11/2020	Lurah Kalurahan Srihardono	IBM
32	SURONTOKO	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	H. Mursidi Ricky Ardian Retno Suharyanti	Pedukuhan Srontakan, Kalurahan Argomulyo	Sedayu	No. 55 / 2020	11/11/2020	Lurah Kalurahan Argomulyo	Sewa
33	BHAKTI WARGA	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Sumarno Faizal Novian Hidayat Eko Yunianto	Pedukuhan Surobayan, Kalurahan Argomulyo	Sedayu	No. 56 / 2020	11/11/2020	Lurah Kalurahan Argomulyo	Sewa
34	GUWOSARI NYAWIJI	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Nur Hidayad, S.E Miftakhul Khasanah Arif Subawanto, A. Md	Taman Banjaran, Watugedug, Guwosari, Pajangan	Pajangan	No. 52 / 2021	01/06/2021	Lurah Guwosari	Sewa
35	GUMINFO	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	M. Nur Hidayat Ahmad Feisal K Laili Isna F	Gedung Andini Mulyo, Gumuk RT 02, Kalurahan Ringinharjo	Bantul	No. 13 / 2021	11/02/2021	Lurah Ringinharjo	IBM
36	MIGUNANI	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Erawati Andriyani Aulia Rachman Firdausy Wakijan	Pos Ronda RT. 26, Miri, Kalurahan Pendowoharjo	Sewon	No. 39 / 2021	23/02/2021	Lurah Pendowoharjo	IBM
37	PENDOPO DAKWAH	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Alqodri Alustad Galih Beirlian David Miftahurrahman	Pendopo Dakwah Gunungsaren, Gunungsaren Lor RT 83, Kalurahan Trimurti	Srandakan	No. 35 b / 2020	29/09/2020	Lurah Trimurti	IBM

38	TEGALLAYANG	Ketua Sekretaris Bendahara	: : : :	Suharyanto Adhanudin Mohammad Soleh	Serambi Dakwah Tegallayang, Tegallayang 10, RT 06, Kalurahan Caturharjo	Pandak	No. 23 / 2021	23/02/2021	Lurah Caturharjo	IBM
39	GEMBIRA	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Ricky Prasetyo Zusuf Tri Purnomo Suryani Wulandari	Gedung Serbaguna, Gemblangan, Ngentak, Kalurahan Timbulharjo	Sewon	No. 19 / 2021	04/01/2021	Lurah Timbulharjo	IBM
40	SEKARTAJI	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Tri Joko Sukarman Ginanjar C Utami Kasna, S. Pd.	Gedung Serbaguna TK LKMD, Karanggayam, Kalurahan Bantul	Bantul	No. 40 / 2021	10/06/2021	Lurah Bantul	IBM
41	FASTMINFO	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Rudito Adani Atikah Rasa Fauzia Kartika Nuraini	Loji Dakwah, Karasan, RT 01, Kalurahan Palbapang	Bantul	No. 25 / 2021	23/02/2021	Lurah Palbapang	IBM
42	BAMANTARA	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Nur Huda Waskitha Yoga Jihan Luthfi Salsabila Indarti	Pondok Agro Nusantara, Jambean RT 07, Kalurahan Triwidadi	Pajangan	No. 47 / 2021	17/06/2021	Lurah Triwidadi	IBM
43	PUTRA DLINGO	Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Tuharno Pipin Ristiani Ayu Bella Pratiwi	Rumah Daring Rani Irawati, Koripan I, RT 02, Dlingo, Dlingo	Dlingo	No. 53 / 2021	30/08/2021	Lurah Dlingo	

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik , 2021

(23) Pemberdayaan PPID

Berdasarkan kejuaraan badan publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan peringkat ke-3. Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dengan nilai 98,14.

Gambar III. 28 Piagam kejuaraan badan publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY

Berdasarkan kualifikasi badan publik ada 10 Badan Publik yang sudah termasuk kualifikasi “Informatif” yaitu :

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,25
2	Pemerintah Kabupaten Bantul	98,14
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96,91
4	Dinas Perdagangan	96,50
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	95,85

	masyarakat dan Kalurahan	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	94,86
7	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	93,57
8	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	93,45
9	Kapanewon Pajangan	91,85
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	91,59

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 2021

Badan publik yang termasuk kualifikasi "Menuju Informatif" yaitu :

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Dinas Kebudayaan	89,57
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	89,39
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	89,34
4	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	88,95
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	87,20
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85,45
7	Dinas Pariwisata	84,81
8	RSUD Panembahan Senopati	84,02
9	Bagian Hukum	81,89
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81,56
11	Kapanewon Sedayu	80,99

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 2021

Kendala yang dihadapi masih banyak Badan Publik yang belum memprioritaskan pelayanan keterbukaan informasi publik, dibuktikan masih ada 10 Badan Publik yang termasuk kualifikasi “Kurang Informatif” dan 14 Badan Publik yang termasuk kualifikasi “Tidak Informatif”. Untuk mengatasi kendala ini perlu dilakukan pendampingan untuk mempercepat proses menuju Badan Publik yang “Informatif”.

(24) Penyelenggaraan statistik daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar (diselenggarakan oleh BPS), statistik sektoral (diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah), dan statistik khusus (diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah terdiri dari data statistik sektoral dan data geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi

geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dimulai dari penetapan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik.

Kabupaten Bantul telah membangun portal data geospasial (geoportal) dan portal data statistik sektoral yang dapat diakses di http://data.bantulkab.go.id/ dan telah terhubung ke geoportal nasional https://tanahair.indonesia.go.id/ dan portal data nasional https://data.go.id/.

Data statistik sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 439 kumpulan data (dataset) dan 713 data (*resource*) yang diunggah oleh 70 instansi. Adapun sejumlah 2 kumpulan data (dataset) dan 19 data (*resource*) tidak dipublikasikan karena berstatus privat atas permintaan produsen data. Data geospasial yang telah dipublikasikan melalui portal data https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 1.496 layer data spasial.

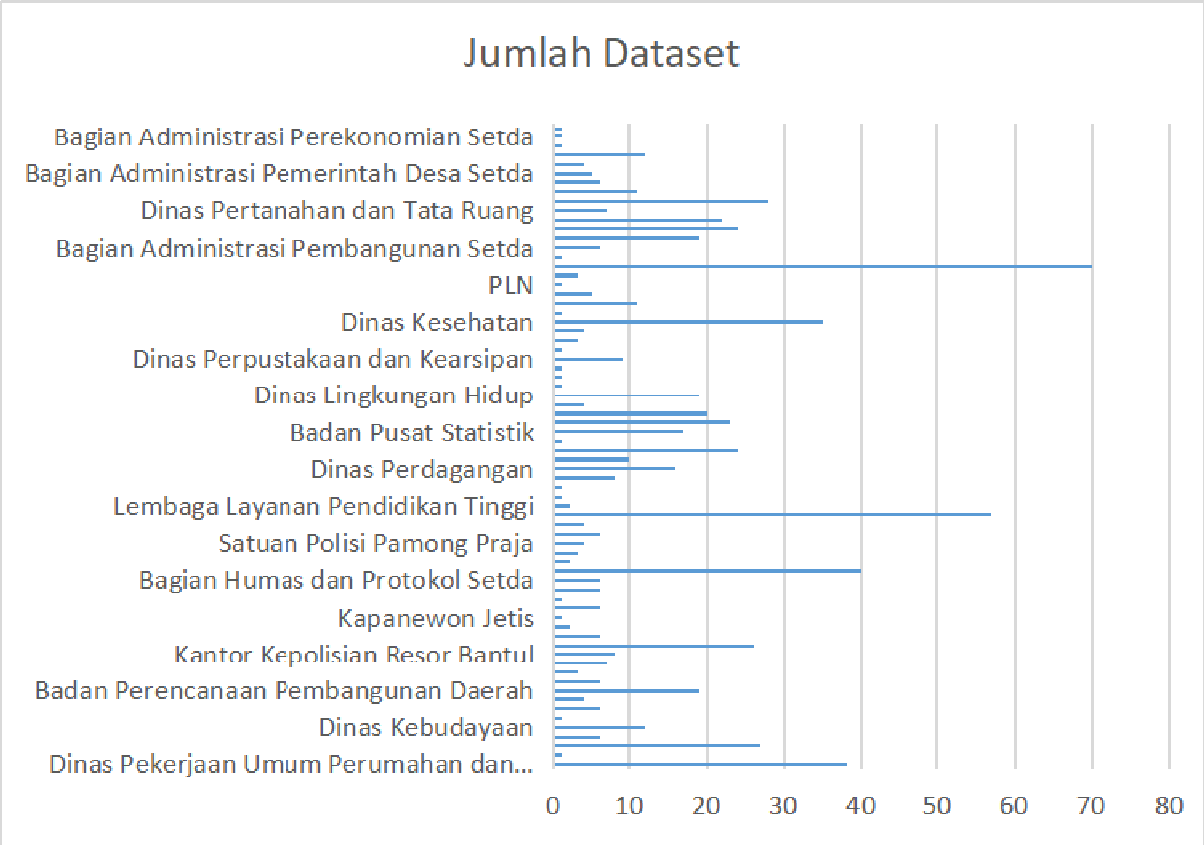

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021.

Gambar III. 29 Grafik Dataset menurut Perangkat Daerah di Portal Data

Tolak ukur kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SDI, diantaranya sesuai Permendagri 86/2017 dan Permendagri 18/2020 dapat dilihap pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.145 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan Datu Data Indonesia (SDI) Tahun 2019-2020

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah dataset yang dipublikasi	dataset	0	380	439
Jumlah dataset yang berstatus privat	dataset	0	18	2
Jumlah *resource* yang dipublikasi	*resource*	0	712	713
Jumlah *resource* yang berstatus privat	*resource*	0	27	19
Jumlah data layer spasial yang dipublikasi	Layes spasial	0	157	112
Persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan	%	0	58.15	53.70
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	2019	2020	2021
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	N/A	100	100
Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	0	95.48	97.40
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	83.75	100	70.53
Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	83.75	100	70.53
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	1	2	2
Tersedianya buku profil daerah	buku	1	1	1
Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	42	43	35
jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	25	37	113
Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Survey	0	0	1
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021.

Dari tabel diatas, beberapa capaian indikator mengalami penurunan, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- Jumlah dataset yang berstatus privat dan jumlah *resource* yang berstatus privat menurun dari 18 dataset dan 27 *resource* menjadi 2 dataset dan 19 *resource.* Hal ini bukan berarti menunjukkan hal yang negatif akan tetapi hal ini berarti semakin banyak OPD yang menyadari keterbukaan informasi publik, disamping itu data yang dimiliki OPD sudah mengacu daftar data yang ditetapkan dimana data tersebut merupakan data yang bersifat publik.
- Jumlah data layer spasial yang dipublikasi dan persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan menurun dari 157 layer (58.15%) menjadi 112 layer (53.70%). Hal ini dikarenakan sampai dengan triwulan ketiga tahun 2021 diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena pandemi covid-19

sehingga tidak bisa dilakukan pertemuan tatap muka. Pertemuan secara daring kurang efektif dilakukan khusus dalam hal pendampingan pengumpulan data geospasial, dikarenakan banyak personil baru walidata pendukung dalam SK Tim SDI yang baru dan belum pernah mendapatkan pelatihan data geospasial.

- Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik dan persentase kelengkapan metadata variabel statistik menurun dari 100% menjadi 70.53%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 perhitungan penyebut yaitu :

Permasalahan	Solusi
1. Belum optimalnya penyajian data/informasi yang seharusnya disajikan untuk masyarakat.	1. Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mengakses dan memperoleh informasi publik.	2. Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
3. tata kelola data yang belum optimal, Sistem informasi dan data base belum saling terintegrasi	3. Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia sebagai dasar tata kelola data di Kabupaten Bantul.
4. Peralatan sandi di kabupaten bantul yang ada sudah kurang memenuhi Standart BSSN sehingga kurang maksimal dalam mendukung kegiatan persandian	4. Pengajuan pemenuhan peralatan sandi kepada TAPD agar sesuai dengan kebutuhan Standart BSSN
5. Masih terbatasnya personil sandi terutama di bidang TI karena beratnya persyaratan yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjadi sandiman.	5. Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui diklat, bimtek, dan kursus persandian yang dilaksanakan oleh BSSN selaku Pembina Tunggal Persandian.
6. Masih terdapat beberapa tim lain yang memiliki ketugasan bersinggungan dengan Tim Penyelenggara SDI sehingga kurang efektif dan rawan duplikasi data pada proses	6. Pembaharuan SK Bupati tentang Tim Penyelanggara SDI (penggabungan beberapa tim)

pengumpulan data	
7. Daftar data statistik sektoral belum ditetapkan oleh Forum SDI	7. Forum SDI menetapkan Daftar data statistik sektoral
8. Peta batas Kalurahan yang digunakan sebagai peta dasar belum ditindaklanjuti dengan perubahan Perbup batas Kalurahan	8. Penyusunan Perubahan Perbup Batas Kalurahan
9. Pengumpulan data belum tersentral dalam satu portal data	9. Integrasi portal data dengan aplikasi Dataku DIY dan aplikasi lain yang memproduksi data, mengusulkan sentralisasi data melalui forum SDI
10. Belum ada kegiatan statistik yang mendapat rekomendasi dari BPS sehingga mengurangi evaluasi kinerja pemerindah daerah urusan statistik	10. Mengkoordinasikan proses rekomendasi BPS secara kolektif mulai tahun 2021

- Jumlah ideal metadata kegiatan/variabel sejumlah 80 kegiatan dari estimasi kegiatan yang dilakukan OPD, adapun pada tahun 2021 telah dilakukan desk inventarisasi kegiatan statistik sektoral berdasarkan daftar data yang ditetapkan, sehingga diperoleh jumlah kegiatan sebesar 207 kegiatan. Jika dilihat dari jumlah pembilang, maka jumlah metadata meningkat dari 80 menjadi 146 kegiatan.
- Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan menurun dari 43 survei menjadi 35 survei, hal ini dikarenakan lebih banyak OPD yang melaksanakan kompilasi produk administrasi dari pendataan melalui aplikasi umum milik pemerintah pusat (survei dilakukan oleh pemerintah pusat), disamping itu sebanyak 5 kegiatan pencacahan lengkap dilakukan dimana

tahun sebelumnya dihitung sebagai survei, sedangkan tahun 2021 dihitung secara terpisah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data
Tahun 2021

No.	Cara Pengumpulan Data	Jumlah	Persentase
1	Pencacahan Lengkap	5	3.42%
2	Survei	35	23.97%
3	Kompilasi Produk Administrasi	106	72.60%
4	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	0	0.00%
	Total	146	100.00%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021.

Ada beberapa permasalahan yang dialami dalam mencapai nilai indeks kualitas layanan informasi publik ini, diantaranya adalah:

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Indeks kualitas layanan informasi publik yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan informasi publik.
b. Meminta tanggapan, umpan balik (*feed back*) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari *wistle blower system*.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
4) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL;

a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

4. **<u>Capaian Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan SubKegiatan</u>**

Capaian indikator kinerja program berdasarkan pelaksanaan program tahun 2021, realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(8) = (7)/(6)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai AKIP	Angka	84	85,24	101%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	8	8	100%	
		Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100%	
		Dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen	2	2	100%	
		Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	14	14	100%	
		Penerima tunjangan kinerja	Orang	49	49	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman peserta bimtek TIK meningkat sebanyak 95% dari 10	Orang	1	1	100%	

		orang					
		Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di bidang TIK	Dokumen	6	6	100%	
		Laporan Peningkatan Kapasitas ASN	Dokumen	6	6	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen alat listrik	Jenis	13	13	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dekorasi Ruangan	Ruangan	1	1	100%	
		Penyediaan AC	Unit	5	5	100%	
		Penyediaan flashdisk	Buah	0	-		
		Penyediaan Meubelair	Set	1	1	100%	
		Penyediaan Peralatan Studio Visual	Jenis	20	20	100%	
		Penyediaan Personal Komputer	Unit	7	7	100%	
		Penyediaan Gordyn	Meter	22	22		
		Penyediaan Printer	Unit	2	2	100%	
		Storage Camera	Unit	3	3		
		Uninterruptible power supply (UPS)	Unit	2	2		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan dan bahan pembersih.	Jenis	12	12	100%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan	Jenis	5	5	100%	
		Penggandaan	Lembar	25.317	25.317	100%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan surat kabar/majalah	Jenis	3	3	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Laporan	130	130	100%	
		Perjalanan dinas dalam daerah	Op	448	448	100%	
		Jumlah tamu	Orang	150	150	100%	
		Perjalanan dinas luar daerah	Op	27	27	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Surat menyurat	Dokumen	1	1	100%	
		Materai dan benda pos	Lembar	628	628	100%	
	Penyediaan Jasa	Penyediaan Alat Tulis	Jenis	27	27	100%	

	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan pengelolaan keuangan	Dokumen	1	1	100%	
		Laporan pengelolaan administrasi kantor	Dokumen	1	1	100%	
		Laporan pengelolaan kebersihan kantor	Dokumen	1	1	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Unit	11	11	100%	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Unit	6	6	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharan peralatan dan mesin	Jenis	4	4	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	Gedung	1	1	100%	
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	%	75	75	100%	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	capaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100%	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen Big Data e-kliping	Dokumen	1	1	100%	
		Laporan dinamika pembangunan Kalurahan	Dokumen	1	1	100%	
		Laporan forum media sosial	Dokumen	2	2	100%	
		Laporan IKM Pemkab Bantul	Dokumen	1	1	100%	
		Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit	Dokumen	1	1	100%	
		Laporan pelaksanaan bimtek jurnalistik	Dokumen	1	1	100%	
		Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jenis	5	5	100%	

	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Barang cetakan	Paket	1	1	100%	
		Media informasi/publikasi pembangunan daerah	Jenis	5	5	100%	
		Video profil	Video	1	1	100%	
		Pembuatan papan baliho	Unit	5	5	100%	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Laporan Bimtek Admin Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Dokumen	1	1	100%	
		Pemberdayaan KIM Tingkat Kabupaten Bantul	Dokumen	1	1	100%	
		Laporan Pendampingan KIM PKR	Dokumen	6	6	100%	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan Forum PPID DIY	Dokumen	1	1	100%	
		Pemahaman peserta Bimtek PPID Kalurahan Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang	Orang	144	144	100%	
		Pemahaman peserta Bimtek PPID Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 90 orang	Orang	86	86	100%	
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	75	75	100%	
		Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	%	55	55	100%	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	capaian kinerja Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100%	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jasa Teknisi NOC dan Mail Server	Orang/Bulan	48	48	100%	
		Layanan Disaster Recovery Center	Lokasi	1	1	100%	
		Pembangunan Gedung Data Center	Gedung	1	1	100%	
		Pemeliharaan Backbone	Km	140	140	100%	
		Pemeliharaan genset dan listrik data center	Unit	1	1	100%	
		Pemeliharaan jaringan LAN	Jaringan	188	188	100%	

		Pemeliharaan Peralatan Data Center	Unit	1	1	100%	
		Pemeliharaan tower	Tower	133	133	100%	
		Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik	Bulan	10	10	100%	
		Penyediaan Peralatan Bantul Comand Center	Set	1	1	100%	
		Revisi DED Pembangunan Data Center	Dokumen	1	1	100%	
		Upgrade jaringan dan wifi	Instansi	15	15	100%	
		Peralatan Jaringan Internet dan Intranet untuk Sekolah Dasar (SD)	Paket	1	1	100%	
		Sewa eternet mensupport kegiatan Konferensi Asia Pasific	Bulan	2	2	100%	
		Pembangunan Jaringan Internet/Intranet (Fiber Optik)	Jaringan	1	1	100%	
		Videotron	Paket	1	1	100%	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Laporan FGD Menara Telekomunikasi	Dokumen	1	1	100%	
		Laporan Sosialisasi Peraturan Pendirian Menara Tk Kabupaten	Dokumen	1	1	100%	
		Penyediaan Wifi Publik	Bulan	12	12	100%	
		Survey menara telekomunikasi	Dokumen	620	620	100%	
		Pembangunan Wifi Publik	Jaringan	1	1	100%	
		Laporan ILM Menara Telekomunikasi	Dokumen	5	5	100%	
		Peralatan Pemantauan Menara	Jenis	3	3	100%	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Integrasi Aplikasi	Aplikasi	5	5	100%	
		Pembangunan Aplikasi Bantul Smart Service	Aplikasi	1	1	100%	
		Pemeliharaan Aplikasi	Aplikasi	16	16	100%	
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Draft Laporan Pelaksanaan Bantul Smartcity	Dokumen	1	1	100%	
		Draft Laporan	Dokumen	1	1	100%	

		Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
		Draft Laporan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	1	100%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	Dokumen	1	1	100%	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	%	100	100	100%	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Pengelolaan portal data	Portal	2	2	100%	
		Draft Laporan Penyelenggaraan Satu Data	Dokumen	1	1	100%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	Layanan	20	20	100%	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100%	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Langganan ISR Radio Komunikasi internal Pemda. Bantul	ISR	4	4	100%	
		Laporan sosialisasi keamanan informasi	Dokumen	1	1	100%	
		Pengelolaan Panggilan Darurat 112	Dokumen	1	1	100%	
		Software keamanan informasi	Dokumen	1	1	100%	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	%	55	100	180%	

	Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Komunitas breaker Pantauan Pantai Selatan	Komunitas	1	1	100%	
		Forum Komunikasi Sandi Daerah	Dokumen	1	1	100%	
		Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan / Kegiatan di Pemkab. Bantul	Laporan	4	4	100%	
		Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	Layanan	20	20	100%	
		Pembayaran rekening telepon pemda	Bulan	12	12	100%	
		Pemeliharaan jaringan telepon	Bulan	12	12	100%	
		Pemeliharaan repeater radio	Repeater	4	4	100%	
		Pengamanan Berita Rahasia	Bulan	12	12	100%	
		Perangkat Kendali Komunikasi Radio	Set	1	1	100%	
		Sewa lahan Repeater	Lokasi	2	2	100%	
		Upgrade jaringan telepon	Dokumen	1	1	100%	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	78	78	100%	
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terpeliharanya sarana dan prasarana keistimewaan Urusan Kebudayaan	%	100	100	100%	
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	ILM QR Code	Dokumen	1	1	100%	
		Pemeliharaan Aplikasi Dan Database	Aplikasi	2	2	100%	
		Pemeliharaan CCTV	CCTV	6	6	100%	
		Pemeliharaan Jaringan FO Makam Imogiri	Jaringan	1	1	100%	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Dengan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan tersebut dan dengan didukung oleh aparatur yang mempunyai komitmen, kemampuan dan kompetensi teknis yang

memadai diharapkan dapat melaksanakan penyebarluasan informasi yang cepat dan akurat.

D. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun anggaran 2021 di Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 20.292.434.034,00 yang digunakan untuk membiayai belanja langsung, dengan realisasi sebesar Rp. 19.248.367.605,00 atau sebesar 94.85%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	11.230.581.902	10.968.585.179	98.67%
2	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	1.456.213.000	1.432.270.175	98.36%
Jumlah		**12.686.794.902**	**12.400.855.354**	97.75%
Belanja Langsung Pendukung		**7.317.002.352**	**6.561.454.310**	89,67%
Total Belanja Langsung		**20.292.434.034**	**19.248.367.605**	94,85%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika , 2021

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. **12.686.794.902** atau sebesar 65.52% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 7.317.002.352 atau sebesar 36.06% dari total belanja langsung.

Serapan Anggaran untuk program/kegiatan pendukung, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar dengan besaran anggaran Rp. 11.230.581.902 dengan prosentase 65.52% dari total belanja langsung terserap Rp. 10.968.585.179 dengan prosentase serapan anggaran 98.67% .Sementara itu, yang kedua adalah sasaran Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik dengan anggaran yang relative kecil yakni Rp. 1.456.213.000 dengan prosentase 7.18% dari total belanja langsung terserap Rp. 1.432.270.175 dengan prosentase serapan anggaran 98,36%

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 94.85% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,51% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97.75%

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan *Digital Government Service* (DGS) sebesar 98,67%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks kualitas layanan informasi publik sebesar 98.36%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik maka sasaran menyerap anggaran paling besar yaitu 98,67%, dari target. Sedangkan sasaran Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standart menyerap anggaran terkecil yaitu 98.36%. dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Program	Indikator kinerja	Satuan	Kinerja		%	Anggaran		%
	Kegiatan / Sub Kegiatan			Target	Realisasi		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai AKIP	Angka	84	85,24	101%	7.385.412.845	6.512.810.856	88%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100%	102.793.250	94.340.750	92%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	8	8	100%	102.793.250	94.340.750	92%
		Dokumen evaluasi perangkat daerah	Dokumen	4	4	100%			
		Dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen	2	2	100%			

		Nilai evaluasi kinerja	Angka	82		0%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100%	5.568.233.854	4.962.671.009	89%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	14	14	100%	5.568.233.854	4.962.671.009	89%
		Penerima tunjangan kinerja	Orang	49	49				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100%	30.000.000	29.150.000	97%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman peserta bimtek TIK meningkat sebanyak 95% dari 10 orang	Orang	1	1	100%	30.000.000	29.150.000	97%
		Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di bidang TIK	Dokumen	6	6				
		Laporan peningkatan kapasitas asn	Dokumen		6				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	100%	**879.959.786**	844.801.902	96%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen alat listrik	Jenis	13	13	100%	10.155.700	10.155.400	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dekorasi ruangan	Ruangan	1	1	100%	594.067.336	569.343.380	96%
		Penyediaan AC	Unit	5	5	100%			
		Penyediaan flashdisk	Buah	0	-				
		Penyediaan meubelair	Set	1	1	100%			
		Penyediaan peralatan studio visual	Jenis	20	20	100%			
		Penyediaan personal komputer	Unit	7	7	100%			
		Penyediaan gordyn	Meter	22	22	100%			
		Penyediaan printer	Unit	2	2	100%			
		Storage camera	Unit	3	3	100%			
		Uninterruptible power supply (UPS)	Unit	2	2	100%			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan dan bahan pembersih.	Jenis	12	12	100%	32.480.000	32.477.500	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan	Jenis	5	5	100%	30.096.250	29.771.964	99%
		Penggandaan	Lembar	25.317	25.317	100%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Bahan bacaan surat	Jenis	3	3	100%	3.600.000	3.276.000	91%

	Perundang-undangan	kabar/majalah							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Laporan	130	130	100%	209.560.500	199.777.658	95%
		Perjalanan dinas dalam daerah	Op	448	448	100%			
		Jumlah tamu	Orang	150	150	100%			
		Perjalanan dinas luar daerah	Op	27	27	100%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100%	254.530.449	249.591.950	98%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Surat menyurat	Dokumen	1	1	100%	30.000.000	29.968.000	100%
		Materai dan benda pos	Lembar	628	628	100%			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	27	27	100%	80.434.449	79.149.950	98%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan pengelolaan keuangan	Dokumen	1	1	100%	144.096.000	140.474.000	97%
		Laporan pengelolaan administrasi kantor	Dokumen	1	1	100%			
		Laporan pengelolaan kebersihan kantor	Dokumen	1	1	100%			

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		0%	499.360.930	380.898.699	79%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Unit	11	11	100%	302.550.000	256.607.545	85%
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Unit	6	6	100%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharan peralatan dan mesin	Jenis	4	4	100%	146.000.000	104.797.700	72%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	Gedung	1	1	100%	32.935.013	19.493.454	59%
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	%	75	75	100%	1.301.063.000	1.278.870.175	98%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100%	1.301.063.000	1.278.870.175	98%
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen Big Data e-kliping	Dokumen	1	1	100%	260.227.500	259.863.100	100%
		Laporan dinamika	Dokumen	1	1	100%			

		pembangunan Kalurahan							
		Laporan forum media sosial	Dokumen	2	2	100%			
		Laporan ikm pemkab bantul	Dokumen	1	1	100%			
		Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit	Dokumen	1	1	100%			
		Laporan pelaksanaan bimtek jurnalistik	Dokumen	1	1	100%			
		Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jenis	5	5	100%			
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Barang cetakan	Paket	1	1	100%	761.527.500	749.161.475	98%
		Media informasi/publikasi pembangunan daerah	Jenis	5	5	100%			
		Video profil	Video	1	1	100%			
		Pembuatan papan baliho	Unit	5	5	100%			
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Laporan bimtek admin kelompok informasi masyarakat (kim)	Dokumen	1	1	100%	200.500.000	193.487.500	97%
		Pemberdayaan kim tingkat kabupaten bantul	Dokumen	1	1	100%			

		Laporan pendampingan KIM PKR	Dokumen	6	6	100%			
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan forum PPID DIY	Dokumen	1	1	100%	78.808.000	76.358.100	97%
		Pemahaman peserta Bimtek PPID Kalurahan Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang	Orang	144	144	100%			
		Pemahaman peserta Bimtek PPID Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 90 orang	Orang	86	86	100%			
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	75	75	100%	9.960.845.402	9.731.651.733	98%
		Persentase pembangunan pusat data (*warehouse data)*	%	55	55	100%			
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100		0%	9.960.845.402	9.731.651.733	98%
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jasa Teknisi NOC dan Mail Server	Orang/bulan	48	48	100%	8.095.708.402	7.937.231.904	98%
		Layanan disaster	Lokasi	1	1	100%			

		recovery center							
		Pembangunan gedung data center	Gedung	1	1	100%			
		Pemeliharaan backbone	Km	140	140	100%			
		Pemeliharaan genset dan listrik data center	Unit	1	1	100%			
		Pemeliharaan jaringan LAN	Jaringan	188	188	100%			
		Pemeliharaan peralatan data center	Unit	1	1	100%			
		Pemeliharaan tower	Tower	133	133	100%			
		Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik	Bulan	10	10	100%			
		Penyediaan peralatan bantul comand center	Set	1	1	100%			
		Revisi ded pembangunan data center	Dokumen	1	1	100%			
		Upgrade jaringan dan wifi	Instansi	15	15	100%			
		Peralatan Jaringan Internet dan Intranet untuk Sekolah Dasar (SD)	Paket	1	1	100%			
		Sewa eternet mensupport kegiatan	Bulan	2	2	100%			

		Konferensi Asia Pasific							
		Pembangunan jaringan internet/intranet *(fiber optik)*	Jaringan	1	1	100%			
		Videotron	Paket	1	1	100%			
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Laporan fgd menara telekomunikasi	Dokumen	1	1	100%	996.500.000	950.858.379	95%
		Laporan sosialisasi peraturan pendirian menara tk kabupaten	Dokumen	1	1	100%			
		Penyediaan wifi publik	Bulan	12	12	100%			
		Survey menara telekomunikasi	Dokumen	620	620	100%			
		Pembangunan wifi publik	Jaringan	1	1	100%			
		Laporan ilm menara telekomunikasi	Dokumen	5	5	100%			
		Peralatan pemantauan menara	Jenis	3	3	100%			
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Integrasi aplikasi	Aplikasi	5	5	100%	675.600.000	650.906.950	96%
		Pembangunan aplikasi bantul smart service	Aplikasi	1	1	100%			

		Pemeliharaan aplikasi	Aplikasi	16	16	100%			
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Draft laporan pelaksanaan bantul smartcity	Dokumen	1	1	100%	193.037.000	192.654.500	100%
		Draft laporan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dokumen	1	1	100%			
		Draft laporan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dokumen	1	1				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	Dokumen	1	1	100%	155.150.000	153.400.000	99%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	%	100	100	100%	155.150.000	153.400.000	99%
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Pengelolaan portal data	Portal	2	2	100%	155.150.000	153.400.000	99%
		Draft laporan penyelenggaraan satu data	Dokumen	1	1	100%			

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	Layanan	20	20	100%	1.304.386.500	1.236.933.446	95%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100%	775.736.500	753.803.031	97%
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Langganan ISR Radio Komunikasi internal Pemda. Bantul	Isr	4	4	100%	775.736.500	753.803.031	97%
		Laporan sosialisasi keamanan informasi	Dokumen	1	1	100%			
		Pengelolaan panggilan darurat 112	Dokumen	1	1	100%			
		Software keamanan informasi	Dokumen	1	1	100%			
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	%	55	55	100%	494.000.000	483.130.415	98%

	Kabupaten/Kota								
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Komunitas breaker Pantauan Pantai Selatan	Komunitas	1	1	100%	494.000.000	483.130.415	98%
		Forum komunikasi sandi daerah	Dokumen	1	1	100%			
		Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan / Kegiatan di Pemkab. Bantul	Laporan	4	4	100%			
		Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	Layanan	20	20	100%			
		Pembayaran rekening telepon pemda	Bulan	12	12	100%			
		Pemeliharaan jaringan telepon	Bulan	12	12	100%			
		Pemeliharaan repeater radio	Repeater	4	4	100%			
		Pengamanan berita rahasia	Bulan	12	12	100%			
		Perangkat kendali komunikasi radio	Set	1	1	100%			
		Sewa lahan Repeater	Lokasi	2	2	100%			
		Upgrade jaringan telepon	Dokumen	1	1	100%			

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	78	78	100%	288.636.780	286.057.941	99%
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terpeliharanya sarana dan prasarana keistimewaan Urusan Kebudayaan	%	100	100	100%	288.636.780	286.057.941	99%
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	ILM QR Code	Dokumen	1	1	100%	288.636.780	286.057.941	99%
		Pemeliharaan aplikasi dan database	Aplikasi	2	2	100%			
		Pemeliharaan CCTV	CCTV	6	6	100%			
		Pemeliharaan jaringan FO makam imogiri	Jaringan	1	1	100%			

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

E. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 5%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 2%, Untuk efisiensi program/kegiatan pendukung juga sebesar 4%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS) sebesar 2%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks kualitas layanan informasi publik sebesar 1%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 4% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik efisiensi anggarannya terkecil yaitu 1% dari anggaran target.

Efisiensi anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terjadi karena beberapa alasan, seperti pada :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari anggaran Rp 5.568.233.854 terserap Rp 4.962.671.009 terdapat sisa anggaran Rp. 605.562.845 (11%)
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari anggaran Rp 594.067.336 terserap Rp 569.343.380 terdapat sisa anggaran 24.723.956 (4%) merupakan efisiensi karena tariff harga sewa domain dan jasa konsultasi lebih rendah.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari anggaran Rp 302.550.000 terserap Rp 256.607.545 terdapat sisa anggaran 45.942.455 (15%) merupakan Efisiensi jasa Pemeliharaan kendaraan dinas.

4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari anggaran Rp 146.000.000 terserap Rp 104.797.700 terdapat sisa anggaran 13.490.023,00 (4%) merupakan Efisiensi Belanja Pemeliharaan alat pendingin.
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari anggaran Rp 32.935.013 terserap Rp 19.493.454 terdapat sisa anggaran 13.441.559 (41%) merupakan Efisiensi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
6. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dari anggaran Rp 8.095.708.402terserap Rp 7.937.231.904terdapat sisa anggaran 158.476.498 (2%) merupakan Efisiensi Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
7. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dari anggaran Rp 996.500.000 terserap Rp 950.858.379 terdapat sisa anggaran 45.641.621 (5%) merupakan Efisiensi Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
8. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dari anggaran Rp 675.600.000 terserap Rp 650.906.950 terdapat sisa anggaran 24.693.050 (4%) merupakan Efisiensi Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
9. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran Rp 775.736.500 terserap Rp 753.803.031terdapat sisa anggaran 24.693.050 (3%) merupakan Efisiensi Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
10. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran Rp 494.000.000 terserap Rp 483.130.415 terdapat sisa anggaran 10.869.585 (2%) merupakan Efisiensi Belanja Tagihan Telepon

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	11.230.581.902	10.968.585.179	261.996.723	2%
2	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	1.456.213.000	1.432.270.175	23.942.825	1%
Jumlah		**12.686.794.902**	**12.400.855.354**	**285.939.548**	**2%**
Belanja Langsung Pendukung		**7.317.002.352**	**6.561.454.310**	**755.548.042**	**10%**
Total Belanja langsung		**20.292.434.034**	**19.248.367.605**	**1.044.066.429**	**5%**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum capaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 102.98%. atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi.**

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.